

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas bimbingan dan Karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 dapat di selesaikan dengan tepat waktu. Rencana Kerja (Renja) mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 sebagai bahan penyusunan dan pertanggungjawaban Kepala SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, disusun sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian data maupun kualitas informasi yang disampaikan . Oleh karena itu, segala kritik dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya dokumen ini sangat kami harapkan.

Slawi Juli 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal

**RETNO SUPROBOWATI, SH.MM.M.Kn.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601101 198603 2 008

**DAFTAR ISI**  
**RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHKRAGA**  
**KABUPATEN TEGAL 2018**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

**BAB I**       Pendahuluan

1.1    Latar Belakang Masalah

1.2    Landasan Hukum

1.3    Maksud dan Tujuan

1.4    Sistematika Penulisan

**BAB II**    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dikbud Tahun 2016

2.1    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dikbud Tahun 2016  
dan Capaian Renstra Dinas Dikbud

2.2    Analisis Kinerja Pelayanan

2.2.1 Rata-rata Lama Sekolah atau Rata-rata Lama Belajar

2.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi  
Kasar (APK)

2.2.3 Kualifikasi Tenaga Pendidik sekurang-kurangnya S1/DIV

2.2.4 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/ Sederajat dalam  
Kategori Baik

2.2.5 Angka Melek Huruf (AMH)

2.2.6 Angka Melanjutkan (AM) Ke jenjang Pendidikan yang  
lebih tinggi

2.2.7 Persentase ruang kelas SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA  
sesuai SPM

2.2.8 Persentase SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA memiliki  
sanitasi yang layak

2.2.9 Angka Lulusan (AL)

2.2.10 Capaian Bidang Pemuda dan Olahraga

2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4    Usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB	III	Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
	3.1	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah
	3.2	Tujuan dan sasaran rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.3	Program dan Kegiatan
BAB	IV	Penutup
Lampiran - lampiran		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Target dan Capaian Rata-rata Lama Sekolah
Gambar 2	Grafik Angka Putus Sekolah
Gambar 3	Grafik Capaian APM Dinas Dikbud Kabupaten Tegal
Gambar 4	Grafik Capaian APK Dinas Dikbud Kabupaten Tegal
Gambar 5	Grafik Keberadaan guru menurut status kepegawaian , jenjang pendidikan dan sertifikasi
Gambar 6	Grafik Kondisi Gedung Sekolah
Gambar 7	Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui anggaran APBN
Gambar 8	Grafik capaian Angka Melek huruf usia > 45 Tahun
Gambar 9	Grafik angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA
Gambar 10	Struktur Organisasi Dinas Dikbud Kabupaten Tegal

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-rata Lama Sekolah
Tabel 2.2	Angka Putus Sekolah
Tabel 2.3	Perkembangan APM dan APK
Tabel 2.4	Kondisi Gedung Sekolah
Tabel 2.5	Angka Melek Huruf
Tabel 2.6	Capaian Bidang POR
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2018

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

Lampiran 1	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Lampiran 2	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Dikbud Kabupaten Tegal.
Lampiran 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Lampiran 4	Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Tahun 2016
Lampiran 5	Rekap DPA 2.2 Tahun 2017

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan Negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta member kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan tenaga kerja menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen dengan asumsi yang lain tetap (*ceteris paribus*) Sementara itu kenaikan 1,0 persen rata-rata jam tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 persen dengan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen.

Di lain pihak kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan.

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan adalah sebuah proses untuk menumbuhkan sisi kepribadian masyarakat secara seimbang dan menyeluruh. Pendidikan akan menjadi pilar kebangkitan. Daerah yang menginginkan kebangkitan harus menyiapkan perencanaan

pembangunan pendidikan secara menyeluruh dengan menyiapkan dan memelihara sarana pendidikan secara massal. Muridnya adalah seluruh warga negara dan gurunya adalah pemimpin dan para birokrat, sementara ilmunya adalah hak-hak dan kewajiban sosial. Sebagai guru maka Pemerintah dan Pembantunya (Birokrat) harus memperoleh pendidikannya terlebih dahulu dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara.

Empat hal yang menyangkut perencanaan pendidikan, yaitu: (a) tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan, (b) keadaan yang terjadi sekarang, (c) alternatif pilihan kebijakan dan prioritas dalam mencapai tujuan, dan (d) strategi penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

Perencanaan merupakan alat pengubah dan pengendali perubahan, sedangkan pembangunan artinya mengubah untuk maju dan berkembang menuju arah tertentu. Ini berarti setiap upaya pembangunan memerlukan perencanaan dan setiap perencanaan adalah untuk mewujudkan upaya pembangunan. Maka dari itu, guna mencapai hasil pembangunan pendidikan yang terarah dan tepat sasaran, diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan di bidang pendidikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pada Tahun 2018.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar

Penilaian Pendidikan;

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2018;

39. Keputusan Bupati Tegal Nomor 1059 Tahun 2014 tentang Pengecahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini dimaksud sebagai rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dibuat dalam satu dokumen perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal Tahun 2018.

Dengan tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 maka akan diketahui rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran, serta efisien dalam penggunaan anggaran. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 juga akan menyelaraskan tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan karakteristik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Tegal serta mensinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2018.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### ***BAB I : PENDAHULUAN***

Bab I menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018, yang antara lain memuat permasalahan yang terjadi sehingga diperlukannya suatu dokumen perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Tegal. Bab ini juga memuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018.

## ***BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016***

Bab ini menjelaskan tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD Kabupaten Tegal Tahun 2016 yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini, sudah disahkan. Selain itu, juga berisi pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun sebelumnya.

## ***BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN***

Bab ini berisi telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Selain itu, berisi juga perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Pada Bab ini juga disampaikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## ***BAB IV : PENUTUP***

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, berisi kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2016 dan  
 Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No.	Program/Kegiatan	Target Renstra (Rp.000)	Target 2016 (Rp.000)	Realisasi 2016 (Rp.000)	Persentase Capaian %	Status Capaian
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.794.392</b>	2.443.587	2.052.538	<b>84,00</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600	8.000	8.000	100,00	ST
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	414.000	464.900	368.537	79,27	T
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	619.792	570.687	437.630	76,68	T
4	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	120.000	125.000	122.988	98,39	ST
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	90.000	150.000	145.821	97,21	ST
6	Penyediaan alat tulis kantor	-	200.000	183.863	91,93	ST
7	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	99.000	70.000	69.013	98,59	ST
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000	100.000	96.613	96,61	ST
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	22.000	40.000	39.442	98,61	ST
10	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	110.000	15.000	14.305	95,37	ST
11	Penyediaan makanan dan minuman	110.000	225.000	218.720	97,21	ST
12	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	110.000	150.000	149.900	99,93	ST
13	Penyediaan jasa pengamanan dalam kantor	-	75.000	73.409	97,88	ST
14	Operasional UPTD Dikpora Kecamatan dan SKB	-	250.000	124.297	49,72	ST
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>518.000</b>	900.000	788.455	<b>87,61</b>	ST
1	Pengadaan Mebeleur	-	50.000	48.605	97,21	ST
2	Pengadaan perangkat komputer printer dan perlengkapannya	110.000	200.000	196.410	98,21	ST
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	150.000	143.420	95,61	ST
4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	176.000	250.000	157.911	63,16	R

5	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	60.000	50.000	47.048	94,10	ST
6	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	172.000	200.000	195.062	97,53	ST
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>66.000</b>	50.000	29.880	<b>59,76</b>	R
1	Pendidikan dan pelatihan formal	66.000	50.000	29.880	59,76	S
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>	<b>465.853</b>	514.580	416.742	<b>80,99</b>	T
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	48.000	50.000	46.452	92,90	ST
1	Penatausahaan & Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	60.000	205.000	199.687	97,41	ST
2	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	-	15.000	15.000	100,00	ST
3	Pendampingan Kegiatan Bantuan Provinsi	357.853	230.000	141.023	61,31	R
4	Pembayaran Kegiatan Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Tahun 2015	-	14.580	14.580	100,00	ST
<b>5</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>1.386.800</b>	931.000	917.632	<b>98,56</b>	ST
1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	75.000	50.000	50.000	100,00	ST
2	Penguatan Kelembagaan PAUD	75.000	125.000	122.257	97,81	ST
3	Penguatan Kelembagaan PAUD Nonformal	20.000	50.000	49.368	98,74	ST
4	Bantuan APE dan Sarana Prasarana PAUD Nonformal	-	40.000	39.069	97,67	ST
5	Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	-	200.000	198.558	99,28	ST
6	Bantuan Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	-	5.000	5.000	100,00	ST
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	-	100.000	100.000	100,00	ST
8	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	1.216.800	36.000	36.000	100,00	ST
9	Bantuan pembangunan RKB PAUD TKN pembina Tarub (Banprop)	-	100.000	99.189	99,19	ST
10	Bantuan pengadaan APE PAUD TKN pembina Slawi (Banprop)	-	10.000	9.778	97,78	ST
11	Bantuan pengadaan mebelair PAUD TKN pembina Slawi (Banprop)	-	15.000	14.790	98,60	ST
12	Bantuan penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD (Banprop)	-	50.000	47.600	95,20	ST
13	Bantuan penyelenggaraan Gebyar PAUD (Banprop)	-	50.000	48.900	97,80	ST

14	Penyempurnaan RKB TKN Pembina Kec. Tarub	-	100.000	97.123	97,12	ST
<b>6</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>17.539.100</b>	27.222.131	24.939.261	<b>91,61</b>	ST
1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100.000	25.000	23.148	92,59	ST
2	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD ( MAPSI )	125.000	100.000	94.001	94,00	ST
3	Regrouping SD	-	25.000	18.964	75,86	S
4	Penataan Lingkungan Sekolah	-	1.920.000	1.658.142	86,36	T
5	Meubel Pengganti	-	560.000	515.650	92,08	ST
6	Pembangunan/Rehab Ruang SMP	-	1.500.000	1.437.313	95,82	ST
7	Peralatan Lab Bahasa Untuk SMP	-	100.000	92.693	92,69	ST
8	Pengadaan Peralatan TIK SMP	-	100.000	88.443	88,44	T
9	Latihan Ujian Nasional / Try Out SMP/MTs	260.000	60.000	56.600	94,33	ST
10	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs	285.000	385.000	279.972	72,72	S
11	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kab. Tegal	100.000	80.000	75.399	94,25	ST
12	Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP	80.000	40.000	38.040	95,10	ST
13	Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembangan Kurikulum SMP Tk Kab Tegal	20.000	10.000	9.516	95,16	ST
14	Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas	50.000	20.000	12.973	64,87	R
15	Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan	30.000	20.000	19.960	99,80	ST
16	Pengadaan Alat Lab IPA	1.000.000	500.000	331.373	66,27	R
17	Fasilitasi Kantin Sehat Sesuai Standart Pelayanan Minimal	150.000	20.000	19.360	96,80	ST
18	Pelatihan MBS/Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP	20.000	15.000	14.840	98,93	ST
19	Fasilitasi Kantin Kejujuran Implementasi Pendidikan Karakter	50.000	10.000	9.878	98,78	ST
20	Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP	30.000	15.000	14.994	99,96	ST
21	Sosialisasi dan Pelatihan PPDB SMP	20.000	15.000	14.996	99,97	ST
22	Pengembangan Kegiatan 13 Mapel MGMP Kabupaten Tegal	260.000	50.000	-	0,00	SR
23	Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal	20.000	15.000	12.965	86,43	T

24	Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	50.000	25.000	24.964	99,86	ST
25	Pelatihan Keagamaan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal	30.000	15.000	14.994	99,96	ST
26	Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	20.000	15.000	11.103	74,02	ST
27	Pelatihan Penyusunan kurikulum SD		50.000	44.288	88,58	ST
28	Festival Kreativitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreativitas dan Kompetensi siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains)	110.000	150.000	122.786	81,86	T
29	Lomba Kreativitas Minat Bakat Siswa TK/RA	30.000	30.000	29.297	97,66	ST
30	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB	450.000	450.000	428.003	95,11	ST
31	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)	210.000	200.000	170.456	85,23	T
32	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	-	750.000	559.216	74,56	S
33	Pengadaan Drum Band SD Negeri 2 Slarang Kidul	-	35.000	34.134	97,52	ST
34	Peningkatan Jalan dan Pagar Keliling SMP N 1 Suradadi	-	200.000	197.968	98,98	ST
35	Pembangunan Gedung SMP Al Musyafa Bojong	-	200.000	-	0,00	SR
36	Pembangunan Pagar Keliling dan Musholla SD Wangandawa 2 Kecamatan Talang	-	200.000	198.085	99,04	ST
37	Pembangunan RKB SMPN 1 Pagerbarang	-	150.000	148.350	98,90	ST
38	Penataan Lingkungan SD Balaradin 3 Lebaksiu	-	150.000	148.932	99,29	ST
39	Penataan Lingkungan SMP N 3 Warurejo	-	150.000	147.079	98,05	ST
40	Pembangunan RKB dan Penataan Lingkungan SDN Sidoharjo 02 Kec. Surodadi		200.000	198.310	99,16	ST
41	Rehabilitasi/Pembangunan Sekolah SD	6.250.000	12.000.000	11.542.187	96,18	ST
42	Sosialisasi BSM/PIP SD	-	35.000	21.626	61,79	R
43	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD ( DAK Pendidikan )	-	4.358.680	4.140.759	95,00	ST
44	Pendampingan DAK Fisik Pendidikan	-	100.000	83.750	83,75	T
45	Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2015	-	616.451	616.451	100,00	ST
46	Bantuan Rehab Ruang Kelas Sedang SDN Ketilang 2 (Banprop)	-	40.000	-	0,00	SR
47	Bantuan Rehab Ruang Kelas Sedang SMP N 3 Talang (Banprop)	-	45.000	43.200	96,00	ST

48	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Dukuh Lo 2 (Banprop)	6.137.100	120.000	118.430	98,69	ST
49	Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Banprop)	-	125.000	76.581	61,26	R
50	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SDN Prupuk Selatan 3 (Banprop)	-	20.000	19.708	98,54	ST
51	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SDN Kedung Banteng 3 (Banprop)	-	20.000	-	0,00	SR
52	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMP N Lebaksiu 2 (Banprop)	-	20.000	19.708	98,54	ST
53	Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Banprop)	-	50.000	47.080	94,16	ST
54	Bantuan Fasilitasi Program PMT-AS (Banprop)	-	54.000	53.802	99,63	ST
55	Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Banprop)	-	50.000	34.429	68,86	S
56	Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi (Banprop)	-	15.000	12.415	82,77	T
57	Penataan Lingkungan SMP N 3 Margasari	-	100.000	96.820	96,82	ST
58	Pengadaan Genshet dan Rumah Genshet SMP N 1 Slawi	-	150.000	129.060	86,04	T
59	Pengadaan Komputer sekolah SMP N 1 Dukuhwaru	-	150.000	147.955	98,64	ST
60	Pengadaan Komputer sekolah SD Setu 02 Kec. Tarub	-	50.000	47.680	95,36	ST
61	Penataan Lingkungan SDN Balapulung kulon 05 Kec. Balapulung	-	150.000	10.330	6,89	R
62	Bantuan Pengadaan Mebelair sekolah SD Kec. Tarub dan Bojong	-	200.000	194.551	97,28	ST
63	Pengadaan buku Perpustakaan SMP	1.652.000	180.000	165.555	91,98	ST
64	Distribusi Kartun Pintar (KIP)	-	18.000	-	0,00	SR
<b>7</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>7.421.000</b>	<b>11.630.000</b>	<b>10.891.602</b>	<b>93,65</b>	<b>ST</b>
1	Pengadaan Mebeluer Sekolah	2.000.000	185.000	103.892	56,16	R
2	Pavingisasi, Pagar Keliling dan Perbaikan Lokasi dan Sanitasi	550.000	3.300.000	3.259.447	98,77	ST
3	Pengembangan Mutu SMA	200.000	150.000	89.719	59,81	R
4	Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal	40.000	30.000	29.800	99,33	ST
5	Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA	125.000	75.000	61.762	82,35	T
6	Lomba Olimpiade Sains Terapan ( OSTN ) Siswa SMK	50.000	50.000	49.680	99,36	ST
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	125.000	100.000	51.293	51,29	R

8	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	200.000	300.000	235.678	78,56	S
9	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	75.000	75.000	34.615	46,15	SR
10	Pengembangan Mutu SMK	300.000	160.000	-	0,00	SR
11	Fasilitasi Implementasi SMM-ISO SMK	100.000	80.000	-	0,00	SR
12	Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) SMK	100.000	100.000	85.593	85,59	T
13	Fasilitasi Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	75.000	75.000	48.287	64,38	R
14	Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK (PPDB)	10.000	10.000	8.078	80,78	T
15	Gelar Inovasi SMK	40.000	40.000	34.632	86,58	T
16	Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA	20.000	20.000	16.892	84,46	T
17	Sosialisasi Sekolah Pendidikan Menengah Universal (SPMU) SMA/SMK	15.000	15.000	14.214	94,76	ST
18	Pelatihan Penyusunan Soal-soal Ulangan/Ujian Guru SMA/SMK	50.000	50.000	48.790	97,58	ST
19	Pembangunan/Rehabilitasi SMA/SMK	1.495.000	4.825.000	4.774.495	98,95	ST
20	Pengadaan Komputer		350.000	343.320	98,09	ST
21	Penataan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 2 Slawi	200.000	200.000	198.436	99,22	ST
22	Pengadaan Alat Laboratorium SMK Negeri 2 Adiwerna	200.000	200.000	196.403	98,20	ST
23	Bantuan Rehab Gedung SMKN Warureja (Banprop)	60.000	60.000	58.771	97,95	ST
24	Bantuan Rehab Gedung SMAN 2 Slawi (Banprop)	60.000	60.000	59.646	99,41	ST
25	Bantuan Pengadaan Komputer SMA N 2 Slawi (Banprop)	40.000	40.000	37.485	93,71	ST
26	Bantuan Pengadaan Komputer SMK N 1 Warureja (Banprop)	40.000	40.000	37.485	93,71	ST
27	Bantuan Beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga tidak mampu (Banprop)	621.000	510.000	493.000	96,67	ST
28	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMKN Dukuhturi (Banprop)	30.000	30.000	29.636	98,79	ST
29	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMAN 3 Slawi (Banprop)	30.000	30.000	29.579	98,60	ST
30	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMAN Balapulang (Banprop)	30.000	30.000	29.706	99,02	ST
31	Bantuan Fasilitasi pengelolaan (BKK) Bursa Kerja Khusus (Banprop)	50.000	50.000	43.560	87,12	ST

32	Bantuan Fasilitas (PBKL) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Banprop)	40.000	40.000	39.769	99,42	ST
33	Bantuan Fasilitas Carier Center (Banprop)	150.000	50.000	49.929	99,86	ST
34	Pembangunan Pager Keliling SMA N 1 Kramat (Banprop)	200.000	200.000	198.802	99,40	ST
35	Pembangunan Gedung SMK N 1 Warureja (Banprop)	100.000	100.000	99.210	99,21	ST
<b>8</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>5.018.000</b>	<b>2.766.500</b>	<b>2.149.007</b>	<b>77,68</b>	
1	Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan (Banprop)	782.000	126.000	126.000	100,00	ST
2	Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Banprop)	900.000	600.000	-	0,00	SR
3	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	350.000	300.000	300.000	100,00	ST
4	Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	150.000	150.000	147.171	98,11	ST
5	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B	120.000	95.000	94.087	99,04	ST
6	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C	195.000	95.000	94.095	99,05	ST
7	Peningkatan Sarana Prasarana Nonformal		230.000	227.694	99,00	ST
8	Pendampingan Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI)	15.000	10.000	8.950	89,50	ST
9	Bantuan pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (Banprop)	75.000	50.000	49.130	98,26	ST
10	Bantuan Fasilitas Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Banprop)	80.000	75.000	75.000	100,00	ST
11	Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Banprop)	80.000	50.000	50.000	100,00	ST
12	Bantuan Fasilitas Penguatan Kelembagaan LKP untuk akreditasi (Banprop)	100.000	75.000	75.000	100,00	ST
13	Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKPM) (Banprop)	75.000	100.000	100.000	100,00	ST
14	Bantuan Fasilitas Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Banprop)	150.000	105.000	105.000	100,00	ST
15	Bantuan Fasilitas Hari Aksara Internasional (Banprop)	-	10.000	10.000	100,00	ST
16	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Banprop)	240.000	110.000	108.600	98,73	ST
17	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Banprop)	146.000	255.500	255.500	100,00	ST
18	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Banprop)	30.000	30.000	30.000	100,00	ST
19	Bantuan Fasilitas keaksara				97,59	ST

	Dasar (Banprop)	1.530.000	300.000	292.780		
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>3.490.200</b>	5.127.200	4.760.673	<b>92,85</b>	ST
1	Diklat Teknis calon kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK	-	225.000	-	0,00	SR
2	Diklat Fungsional penilik PNFI	-	30.000	22.949	76,50	S
3	Kegiatan sertifikasi guru	-	30.000	28.720	95,73	ST
4	Kegiatan kolektif guru (KKG, KKKS, MGMP, MKKS)	40.000	20.000	13.070	65,35	R
5	Pengelolaan data Kepegawaian Tendik	-	15.000	10.976	73,17	S
6	Penilaian Kinerja Guru (PKG)	70.000	30.000	26.170	87,23	T
7	Kegiatan Penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS)	-	135.000	124.865	92,49	ST
8	Penilaian kinerja penilik	14.000	10.000	10.000	100,00	ST
9	Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	17.200	15.000	11.941	79,61	ST
10	Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Pendidik	80.000	150.000	140.843	93,90	ST
11	Seleksi calon kepala sekolah, Pengawas, Penilik	300.000	300.000	233.019	77,67	ST
12	Kegiatan serahterima jabatan tenaga kependidikan	10.000	10.000	9.700	97,00	ST
13	Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	110.000	50.000	44.125	88,25	T
14	Kegiatan jambore PNFI	150.000	75.000	75.000	100,00	ST
15	OSN (olympiade sains nasional) Guru SD,SMP,SMA/SMK	30.000	20.000	11.945	59,73	R
16	Peningkatan kesejahteraan PTK Sekolah Negeri	-	2.896.000	2.894.250	99,94	ST
17	Kegiatan Induksi Guru /Pemula	-	40.000	37.400	93,50	ST
18	Bantuan kesejahteraan Pendidik PAUD (Banprop)	591.000	235.200	235.200	100,00	ST
19	Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD (Banprop)	525.000	175.000	175.000	100,00	ST
20	Bantuan Kesejahteraan pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Banprop)	1.365.000	456.000	456.000	100,00	ST
21	Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D.4 Pendidik Formal (Banprop)	188.000	210.000	199.500	95,00	ST
<b>10</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	-	973.957	627.035	<b>64,38</b>	R
1	Managemen dan Monitoring BOS	-	200.000	179.202	89,60	T
2	Pendataan Aset Dinas Dikpora	-	40.000	40.000	100,00	ST
3	Monitoring dan Evaluasi Mutu Pendidikan	-	40.000	38.183	95,46	ST
4	Penunjang Pendataan				71,29	S

	Pendidikan	-	75.000	53.469		
5	Bantuan manajemen Pendataan Pendidikan (Banprop)	-	57.000	47.351	83,07	T
6	Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan UN dan UNPK (Banprop)	-	561.957	268.831	47,84	SR
<b>11</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>13.500</b>	13.500	13.030	<b>96,52</b>	
1	Penyelenggaraan pameran Investasi	13.500	13.500	13.030	96,52	SR
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>657.000</b>	850.000	822.500	<b>96,76</b>	ST
1	Penyelenggaraan TUBB	108.000	100.000	99.222	99,22	ST
2	Pemberdayaan pemuda dan pembinaan pelajar	-	300.000	283.091	94,36	ST
3	Pembinaan Paskibra dan pelaksana HUT RI	339.000	300.000	293.649	97,88	ST
4	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui jalur pendidikan (banprop)	100.000	50.000	48.798	97,60	ST
5	Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Banprop)	110.000	100.000	97.740	97,74	ST
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarkatan Olah Raga</b>	<b>923.065</b>	385.000	379.765	<b>98,64</b>	ST
1	Penyelenggaraan kompetensi olahraga	673.065	265.000	264.950	99,98	ST
2	Pekan Seni Pelajar	100.000	40.000	36.565	91,41	ST
3	Fasilitas pelatihan guru/pembina olahraga	100.000	40.000	38.250	95,63	ST
4	Fasilitas pengembangan potensi siswa	50.000	40.000	40.000	100,00	ST
<b>14</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga</b>	<b>825.000</b>	630.000	620.408	<b>98,48</b>	ST
1	Pengadaan alat olahraga	200.000	180.000	176.610	98,12	ST
2	Fasilitas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	125.000	50.000	49.950	99,90	ST
3	Pengelola kolam renang	300.000	300.000	298.073	99,36	ST
4	Pemeliharaan dan perawatan kawasan GOR dan sekitarnya	200.000	100.000	95.775	95,78	ST
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>	<b>75.000</b>	75.000	72.882	<b>97,18</b>	ST
1	Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	75.000	75.000	72.882	97,18	ST
	<b>JUMLAH</b>	<b>40.192.910</b>	54.512.455	49.481.410	<b>90,77</b>	ST

No	Program/Kegiatan	Target Renstra	Target 2016	Realisasi 2016	Persentase Capaian %	Status Capaian
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Selama 1 tahun	Selama 1 tahun	100	ST
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	100%	18 UPTD dan 1 SKPD	18 UPTD dan 1 SKPD	100,00	ST
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	Terbayarnya 23 PTT	Terbayarnya 23 PTT	100	ST
	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	100%	Kantor Dinas Dikpora	Kantor Dinas Dikpora	100,00	ST
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	1 paket	1 paket	100,00	ST
	Penyediaan alat tulis kantor		1 Paket	1 Paket	100,00	ST
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	100%	18 UPTD 1 Kantor Dikbud	18 UPTD 1 Kantor Dikbud	100,00	ST
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1 paket	1 paket	100,00	ST
	Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	1 paket	1 paket	100,00	ST
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	100%	Pembelian Koran dan Bahan Bacaan	Pembelian Koran dan Bahan Bacaan	100,00	ST
	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Makaan minum kantor dan 18 UPTD	Makaan minum kantor dan 18 UPTD	100,00	ST
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	100%	Perjalanan Dinas selama 1 tahun	Perjalanan Dinas selama 1 tahun	100,00	ST
	Penyediaan jasa pengamanan dalam kantor	100%	1 tahun	1 tahun	100,00	ST
	Operasional UPTD Dikpora Kecamatan dan SKB	100%	18 UPTD	18 UPTD	100,00	ST
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	Pengadaan Mebeleur	100%	4 Jenis Mebelair	4 Jenis Mebelair	100,00	ST
	Pengadaan perangkat komputer printer dan perlengkapannya	100%	12 Unit Komputer	12 Unit Komputer	100,00	ST
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	ST
	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	100%	8 Mobil, 55 Motor	8 Mobil, 55 Motor	100,00	ST
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	100%	Peralatan Kantor SKPD Dikpora	Peralatan Kantor SKPD Dikpora	100,00	ST
	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	100%	2 Paket	2 Paket	100,00	ST
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	Pendidikan dan pelatihan formal	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	ST
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>					

	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	100%	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan	100,00	ST
	Penatausahaan & Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	100%	Terselenggaranya Laporan keuangan selama 1 tahun	Terselenggaranya Laporan keuangan selama 1 tahun	100,00	ST
	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah		Tertatanya data barang milik daerah	Tertatanya data barang milik daerah	100,00	ST
	Pendampingan Kegiatan Bantuan Provinsi	100%	47 Kegiatan Banprov	47 Kegiatan Banprov	100,00	ST
	Pembayaran Kegiatan Operasional Kegiatan Bantuan Provinsi Tahun 2015		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	ST
<b>5</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>					
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	80	105 Orang	105 Orang	100,00	ST
	Penguatan Kelembagaan PAUD	3	60 Orang	60 Orang	100,00	ST
	Penguatan Kelembagaan PAUD Nonformal	2	Mebelair 4 lembaga	Mebelair 4 lembaga	100,00	ST
	Bantuan APE dan Sarana Prasarana PAUD Nonformal	-	APE 4 lembaga	APE 4 lembaga	100,00	ST
	Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	-	1 Paket UGB	1 Paket UGB	100,00	ST
	Bantuan Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	-	1 Paket	1 Paket	100,00	ST
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	-	20 lembaga	20 lembaga	100,00	ST
	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	169	14.700 siswa	14.700 siswa	100,00	ST
	Bantuan pembangunan RKB PAUD TKN pembina Tarub (Banprop)	-	1 RKB	1 RKB	100,00	ST
	Bantuan pengadaan APE PAUD TKN pembina Slawi (Banprop)	-	1 Paket APE outdoor dan Indoor	1 Paket APE outdoor dan Indoor	100,00	ST
	Bantuan pengadaan mebelair PAUD TKN pembina Slawi (Banprop)	-	1 Paket Mebelair	1 Paket Mebelair	100,00	ST
	Bantuan penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD (Banprop)	-	232 bunda PAUD	232 bunda PAUD	100,00	ST
	Bantuan penyelenggaraan Gebyar PAUD (Banprop)	-	300 Peserta	300 Peserta	100,00	ST

	Penyempurnaan RKB TKN Pembina Kec. Tarub	-	1 Unit RKB	1 Unit RKB	100,00	ST
<b>6</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>					
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	70	105 SMP	105 SMP	100,00	ST
	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD ( MAPSI )	750 siswa	23 lomba, 500 peserta	23 lomba, 500 peserta	100,00	ST
	Regrouping SD	-	5 Sekolah	5 Sekolah	100,00	ST
	Penataan Lingkungan Sekolah	-	21 Sekolah	19 Sekolah	90,50	ST
	Meubel Pengganti	-	37 Unit	37 Unit	100,00	ST
	Pembangunan/Rehab Ruang SMP	-	12 Sekolah	12 Sekolah	100,00	ST
	Peralatan Lab Bahasa Untuk SMP	-	1 paket	1 paket	100,00	ST
	Pengadaan Peralatan TIK SMP	-	1 SMP	1 SMP	100,00	ST
	Latihan Ujian Nasional / Try Out SMP/MTs	24.000 siswa	25.000 siswa SMP/MTs	25.000 siswa SMP/MTs	100,00	ST
	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs	24.500 lulus UN 99,9%	25.000 siswa SMP/MTs	25.000 siswa SMP/MTs	100,00	ST
	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kab. Tegal	750 siswa	700 siswa	819 siswa	100,00	ST
	Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP	rangling 15 besar Tk Prp	388 peserta	388 peserta	100,00	ST
	Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembangan Kurikulum SMP Tk Kab Tegal	36 orang	36 orang	36 orang	100,00	ST
	Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas	99 SMP N/S	120 peserta	120 peserta	100,00	ST
	Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan	99 SMP N/S	198 peserta	198 peserta	100,00	ST
	Pengadaan Alat Lab IPA	20 SMP N/S	9 SMP	9 SMP	100,00	ST
	Fasilitasi Kantin Sehat Sesuai Standart Pelayanan Minimal	20 SMP N/S	10 SMP	10 SMP	100,00	ST
	Pelatihan MBS/Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP	99 SMP N/S	105 Peserta	105 Peserta	100,00	ST
	Fasilitasi Kantin Kejujuran Implementasi Pendidikan Karakter	20 SMP N/S	10 SMP	10 SMP	100,00	ST
	Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP	99 SMP N/S	103 Peserta	103 Peserta	100,00	ST
	Sosialisasi dan Pelatihan PPDB SMP	50% SMP N/S	99 SMP	99 SMP	100,00	ST

	Pengembangan Kegiatan 13 Mapel MGMP Kabupaten Tegal	13 mapel MGMP	13 MGMP	-	0,00	SR
	Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal	150 siswa	260 Peserta	260 Peserta	100,00	ST
	Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	99 SMP N/S	400 Orang	400 Orang	100,00	ST
	Pelatihan Kejiata Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal	20 SMP	110 Peserta	110 Peserta	100,00	ST
	Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	200 siswa	120 Peserta	120 Peserta	100,00	ST
	Pelatihan Penyusunan kurikulum SD	0	120 peserta	120 peserta	100,00	ST
	Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreatifitas dan Kompetensi siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains)	180	14 lomba, 450 siswa	14 lomba, 450 siswa	100,00	ST
	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK/RA	250	6 lomba, 1,340 peserta	6 lomba, 1,340 peserta	100,00	ST
	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB	26850	27.000 siswa	26.402 siswa	100,00	ST
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)	1250 peserta	13.000 Siswa	13.000 Siswa	100,00	ST
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	-	4 Ruang	4 Ruang	100,00	ST
	Pengadaan Drum Band SD Negeri 2 Slarang Kidul	-	1 set	1 set	100,00	ST
	Peningkatan Jalan dan Pagar Keliling SMP N 1 Suradadi	-	1 sekolah	1 sekolah	100,00	ST
	Pembangunan Gedung SMP Al Musyafa Bojong	-	-	-	0,00	SR
	Pembangunan Pagar Keliling dan Musholla SD Wangandawa 2 Kecamatan Talang	-	1 Unit	1 Unit	100,00	ST
	Pembangunan RKB SMPN 1 Pagerbarang	-	1 sekolah	1 sekolah	100,00	ST
	Penataan Lingkungan SD Balaradin 3 Lebaksu	-	1 sekolah	1 sekolah	100,00	ST
	Penataan Lingkungan SMP N 3 Warurejo	-	1 sekolah	1 sekolah	100,00	ST
	Pembangunan RKB dan Penataan Lingkungan SDN Sidoharjo 02 Kec. Surodadi	-	1 sekolah	1 sekolah	100,00	ST
	Rehabilitasi/Pembangunan Sekolah SD	150 ruang	69 Sekolah	69 Sekolah	100,00	ST
	Sosialisasi BSM/PIP SD	-	-	-	0,00	SR

	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD ( DAK Pendidikan )	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Pendampingan DAK Fisik Pendidikan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	83,70	
	Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2015	-	3 Paket	3 Paket	100,00	ST
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Sedang SDN Ketilang 2 (Banprop)	-	1 Ruang	-	0,00	SR
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Sedang SMP N 3 Talang (Banprop)	-	1 Ruang	1 Ruang	100,00	ST
	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Dukuh Lo 2 (Banprop)	54 ruang	1 Ruang	1 Ruang	100,00	ST
	Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Banprop)	-	1 paket	1 paket	100,00	ST
	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SDN Prupuk Selatan 3 (Banprop)	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SDN Kedung Banteng 3 (Banprop)	-	1 Kegiatan	-	0,00	SR
	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMP N Lebaksiu 2 (Banprop)	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Banprop)	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00	T
	Bantuan Fasilitas Program PMT-AS (Banprop)	-	2 SD, 50 hari, 266 siswa	2 SD, 50 hari, 266 siswa	100,00	ST
	Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Banprop)	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00	T
	Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi (Banprop)	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Penataan Lingkungan SMP N 3 Margasari	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Pengadaan Genshet dan Rumah Genshet SMP N 1 Slawi	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	ST
	Pengadaan Komputer sekolah SMP N 1 Dukuhwaru	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Pengadaan Komputer sekolah SD Setu 02 Kec. Tarub	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Penataan Lingkungan SDN Balapulung kulon 05 Kec. Balapulung	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	ST
	Bantuan Pengadaan Mebelair sekolah SD Kec. Tarub dan Bojong	-	13 Unit	13 Unit	100,00	ST

	Pengadaan buku Perpustakaan SMP	50	3 Set	3 Set	100,00	ST
	Distribusi Kartun Pintar (KIP)	-	1 Paket	-	0,00	SR
7	<b>Program Pendidikan Menengah</b>					
	Pengadaan Mebeluer Sekolah	10 sekolah	5 sekolah	5 Sekolah	100,00	ST
	Pavingisasi, Pagar Keliling dan Perbaikan Lokasi dan Sanitasi	5 sekolah	23 Sekolah	23 Sekolah	100,00	ST
	Pengembangan Mutu SMA	2 sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	100,00	ST
	Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal	2 sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	100,00	ST
	Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA	4 Mapel	4 Mapel	4 Mapel	100,00	ST
	Lomba Olimpiade Sains Terapan ( OSTN ) Siswa SMK	250 siswa	250 siswa	250 siswa	100,00	ST
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	275 siswa	2 Kegiatan Lomba	2 Kegiatan Lomba	100,00	ST
	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	13500 siswa	101 Sekolah	101 Sekolah	100,00	ST
	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	150 siswa	6 Mata Lomba	6 Mata Lomba	100,00	ST
	Pengembangan Mutu SMK	6 SMK	1 Paket	-	0,00	SR
	Fasilitasi Implementasi SMM-ISO SMK	4 SMK	1 Paket	-	0,00	SR
	Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) SMK	175 siswa	175 siswa	175 siswa	100,00	ST
	Fasilitasi Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	6 mata lomba	6 Mata Lomba	6 Mata Lomba	100,00	ST
	Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK (PPDB)	87 sekolah	87 Sekolah	87 Sekolah	100,00	ST
	Gelar Inovasi SMK	6 sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	100,00	ST
	Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA	1 sekolah				ST
	Sosialisasi Sekolah Pendidikan Menengah Universal (SPMU) SMA/SMK	87 sekolah	87 Sekolah	87 Sekolah	100,00	ST
	Pelatihan Penyusunan Soal-soal Ulangan/Ujian Guru SMA/SMK	4 mapel	4 Mapel	4 Mapel	100,00	ST
	Pembangunan/Rehabilitasi SMA/SMK	14 sekolah	33 Sekolah	33 Sekolah	100,00	ST
	Pengadaan Komputer		2 Sekolah	2 Sekolah	100,00	ST
	Penataan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 2 Slawi	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Pengadaan Alat Laboratorium SMK Negeri 2 Adiwerna	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Rehab Gedung SMKN Warureja (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST

	Bantuan Rehab Gedung SMAN 2 Slawi (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Pengadaan Komputer SMA N 2 Slawi (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Pengadaan Komputer SMK N 1 Warureja (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga tidak mampu (Banprop)	621 siswa	510 Siswa	493 siswa	97,70	ST
	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMKN Dukuhturi (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMAN 3 Slawi (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMAN Balapulang (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas pengelolaan (BKK) Bursa Kerja Khusus (Banprop)	2 sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas (PBKL) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Banprop)	2 sekolah	2 SMA	2 SMA	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas Carier Center (Banprop)	3 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Pembangunan Pager Keliling SMA N 1 Kramat (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
	Pembangunan Gedung SMK N 1 Warureja (Banprop)	1 sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	ST
8	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>					
	Bantuan Fasilitas Keaksaran Lanjutan (Banprop)	170	280 Warga Belajar	280 Warga Belajar	100,00	ST
	Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Banprop)	3	2 UGB	-	0,00	SR
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	1	100 Orang	100 Orang	100,00	ST
	Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	1	Paket A 69 WB, Paket B 322, Paket C 1460	Paket A 69 WB, Paket B 322, Paket C 1460	100,00	ST
	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B	1	560 Siswa	419 Siswa	99,70	ST
	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C	1	1.200 siswa	1.200 siswa	100,00	ST
	Peningkatan Sarana Prasarana Nonformal		3 Unit sarana PKBM	3 Unit sarana PKBM	100,00	ST

	Pendampingan Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI)	1	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	100,00	ST
	Bantuan pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (Banprop)	1	90 Orang Peserta	90 Orang Peserta	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Banprop)	8	3 lembaga PKBM	3 lembaga PKBM	100,00	ST
	Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Banprop)	8	5 lembaga PKBM	5 lembaga PKBM	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas Penguatan Kelembagaan LKP untuk akreditasi (Banprop)	4	3 Lembaga LKP	3 Lembaga LKP	100,00	ST
	Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKPM) (Banprop)	3	4 Lembaga PKBM	4 Lembaga PKBM	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Banprop)	10	7 Lembaga PKBM	7 Lembaga PKBM	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas Hari Aksara Internasional (Banprop)	-	1 Paket	1 Paket	100,00	ST
	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Banprop)	16	7 Lembaga PKBM	7 Lembaga PKBM	100,00	ST
	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Banprop)	4	7 Lembaga PKBM	7 Lembaga PKBM	100,00	ST
	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Banprop)	3	3 Lembaga PKBM	3 Lembaga PKBM	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas keaksara Dasar (Banprop)	425	810 Warga Belajar	810 Warga Belajar	100,00	ST
9	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>					
	Diklat Teknis calon kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK	-	97 orang	0 orang	0,00	SR
	Diklat Fungsional penilik PNFI	-	53 orang	47 orang	88,68	T
	Kegiatan sertifikasi guru	-	650 orang	290 orang	44,62	SR
	Kegiatan kolektif guru (KKG, KKKS, MGMP, MKKS)	20 pertemuan	20 KKG	14 KKG	70,00	S
	Pengelolaan data Kepegawaian Tendik	-	47 SMP	0 SMP	0,00	SR
	Penilaian Kinerja Guru (PKG)	7000 orang	150 Orang	150 Orang	100,00	ST
	Kegiatan Penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS)	-	270 Orang	260 Orang	96,30	ST

	Penilaian kinerja penilik	70 orang	53 orang	47 orang	88,68	T
	Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	86 orang	73 Orang	62 Orang	84,93	T
	Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Pendidik	7000 guru	7.000 orang	5.715 Orang	81,64	T
	Seleksi calon kepala sekolah, Pengawas, Penilik	300 orang	210 Orang	125 Orang	59,52	R
	Kegiatan serahterima jabatan tenaga kependidikan	1 kali	6 Orang	6 Orang	100,00	ST
	Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	100 orang	-	-	0,00	SR
	Kegiatan jambore PNFI	110 orang	14 lomba	11 lomba	78,57	T
	OSN (olympiade sains nasional) Guru SD,SMP,SMA/SMK	42 orang	22 lomba	11 lomba	50,00	SR
	Peningkatan kesejahteraan PTK Sekolah Negeri	-	1.204 orang	1.204 orang	100,00	ST
	Kegiatan Induksi Guru /Pemula	-	250 Orang	250 Orang	100,00	ST
	Bantuan kesejahteraan Pendidik PAUD (Banprop)	260 orang	98 Orang	98 Orang	100,00	ST
	Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD (Banprop)	150 orang	50 Orang	50 Orang	100,00	ST
	Bantuan Kesejahteraan pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Banprop)	600 orang	190 Orang	190 Orang	100,00	ST
	Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D.4 Pendidik Formal (Banprop)	160 orang	60 Orang	60 Orang	100,00	ST
10	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>					
	Managemen dan Monitoring BOS		2 kali Sosialisasi, 4 kali monitoring	2 kali Sosialisasi, 4 kali monitoring	100,00	ST
	Pendataan Aset Dinas Dikpora	-	1 Paket	1 Paket	100,00	ST
	Monitoring dan Evaluasi Mutu Pendidikan	-	4 kali rapat, 12 kali monitoring	4 kali rapat, 12 kali monitoring	100,00	ST
	Penunjang Pendataan Pendidikan	-	2 kegiatan, 4 kali rapat koordinasi	2 kegiatan, 4 kali rapat koordinasi	100,00	ST
	Bantuan manajemen Pendataan Pendidikan (Banprop)	-	1 Aplikasi Pendataan , 4 kali rapat koordinasi	1 Aplikasi Pendataan , 4 kali rapat koordinasi	100,00	ST
	Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan UN dan UNPK (Banprop)	-	2 kali Pemantauan Ujian Nasional dan Kegiatan UN	2 kali Pemantauan Ujian Nasional dan Kegiatan UN	100,00	ST
11	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama</b>					

	<b>Investasi</b>					
	Penyelenggaraan pameran Investasi	1	1 kali pameran	1 kali pameran	100,00	ST
12	<b>Program Peningkatan peran serta kepemudaan</b>					
	Penyelenggaraan TUBB	48 sekolah	Penyelenggaraan TUB SD, SMP, SMA/SMK Kab.Tegal	Penyelenggaraan TUB SD, SMP, SMA/SMK Kab.Tegal	100,00	ST
	Pemberdayaan pemuda dan pembinaan pelajar	-	Seleksi Pemuda Pelopor, Lomba Drumband SD, SMP, SMA/SMK, Pengiriman Pemuda Kapal.	Seleksi Pemuda Pelopor, Lomba Drumband SD, SMP, SMA/SMK, Pengiriman Pemuda Kapal.	100,00	ST
	Pembinaan Paskibra dan pelaksana HUT RI	250 siswa	Pelaksanaan Paskibraka 80 siswa	Pelaksanaan Paskibraka 80 siswa	100,00	ST
	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui jalur pendidikan (banprop)	100%	Pengiriman Kemah Nasionalisme Tk.Provinsi (2 regu)	Pengiriman Kemah Nasionalisme Tk.Provinsi (2 regu)	100,00	ST
	Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Banprop)	225	Kursus Mahir Dasar 70 pembina	Kursus Mahir Dasar 70 pembina	100,00	ST
13	<b>Program Pembinaan dan Pemasrykatan Olah Raga</b>					
	Penyelenggaraan kompetensi olahraga	15 Cab OR	Kompetisi atlet untuk 15 cabang olahraga	Kompetisi atlet untuk 15 cabang olahraga	100,00	ST
	Pekan Seni Pelajar	5 Cab Seni	Evaluasi dan Seleksi Seni Pelajar Tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK	Evaluasi dan Seleksi Seni Pelajar Tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK	100,00	ST
	Fasilitasi pelatihan guru/pembina olahraga	150 orang	Pelatihan Guru/Pembina Olahraga SD, SMP, SMA/SMK (105 guru)	Pelatihan Guru/Pembina Olahraga SD, SMP, SMA/SMK (105 guru)	100,00	ST
	Fasilitasi pengembangan potensi siswa	100%	Seleksi atlet O2SN Tingkat Karesidenan dan Provinsi (98 atlet)	Seleksi atlet O2SN Tingkat Karesidenan dan Provinsi (98 atlet)	100,00	ST
14	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga</b>					
	Pengadaan alat olahraga	35%	Net Tennis Meja 21 buah, Bed Tennis 42 buah, Meja Tennis 21 buah dan Matras 11 buah	Net Tennis Meja 21 buah, Bed Tennis 42 buah, Meja Tennis 21 buah dan Matras 11 buah	100,00	ST

	Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	100%	Kegiatan lomba lari 28 Km, Senam dan Pengadaan Ijazah UKA 450 atlet	Kegiatan lomba lari 28 Km, Senam dan Pengadaan Ijazah UKA 450 atlet	100,00	ST
	Pengelola kolam renang	100%	Terbayarnya Honor PHL 18 orang, belanja obat-obatan air dan cetak leaflet	Terbayarnya Honor PHL 18 orang, belanja obat-obatan air dan cetak leaflet	100,00	ST
	Pemeliharaan dan perawatan kawasan GOR dan sekitarnya	60%	Perbaikan ringan dan pemeliharaan ringan fisik GOR serta kebersihannya	Perbaikan ringan dan pemeliharaan ringan fisik GOR serta kebersihannya	100,00	
15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>					
	Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	3	1 paket	1 paket	100,00	ST
	<b>JUMLAH</b>					

Pada Tahun 2016, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal melaksanakan 15 Program dan 241 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 54.512.455.000,- (Lima puluh empat milyar limaratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Realisasi keuangan terhadap anggaran yang tersedia sebesar 90,77% atau sebesar Rp.49.480.955.403,- sedangkan realisasi fisik sebesar 92,97%.

Sedangkan pada tahun 2015, melalui APBD TA. 2015, Dinas Pendidikan melaksanakan 15 Program dan 186 Kegiatan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 72.016.606.000,- (tujuh puluh dua milyar enam belas juta enam ratus enam ribu rupiah). Adapun target pencapaian realisasi keuangan maupun fisik di Tahun 2015 sebesar 100%.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal lebih menitikberatkan pada upaya pencapaian indikator-indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014– 2019.

### **2.2.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Rata-Rata Lama Belajar (RLB).**

Indikator ini mengandung definisi Rata-Rata Lama Sekolah/Belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Indikator ini merupakan salah satu dari Indikator Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, dan sangat terkait dengan Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mengelola pendidikan persekolahan sehingga dapat meningkatkan kinerja tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sedangkan Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang dimaksud adalah untuk mengatur pendidikan agar menjadi semakin baik. Selain itu, manajemen dapat diarahkan pada pendidikan yang efisien dipandang dari segi internal pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengukur indikator Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik ini digunakan efisiensi pendidikan agar sasaran di bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna dalam arti dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu tenaga dan sebagainya.

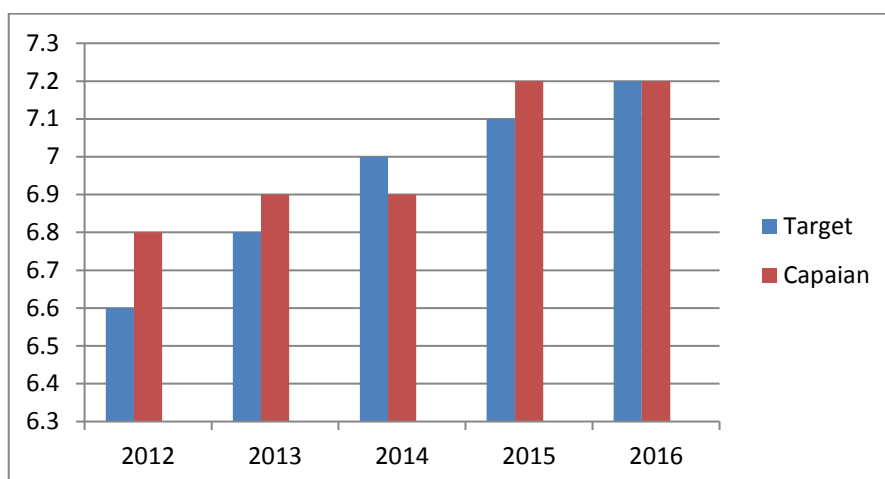
Berdasarkan data yang dimiliki, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal diakhir Tahun 2016 mempunyai nilai yang sama dengan Tahun 2015 . Hal ini dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.1. berikut ini.

**Tabel 2.1 Rata-rata Lama Sekolah**

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Rata-rata Lama Sekolah	6.90	6.92	7.20	7.20

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

**Gambar I Grafik Target dan capaian rata-rata lama sekolah**



Tahun 2015 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal sebesar 7,20 atau setara dengan tingkat / kelas VII pada jenjang SMP (7 Tahun 2 Bulan). Pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal Tahun 2015 memenuhi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2015 yaitu sebesar 7,10. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal sebesar 7,20 di Tahun 2016 telah memenuhi target tahunan sebesar 7.20 di Tahun 2016, tetapi angka tersebut belum memenuhi target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 yang sebesar 9,00.

Dengan kondisi seperti ini, maka perlu dilakukan upaya yang konsisten dan terus menerus agar angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal dapat naik secara signifikan. Upaya yang terus dilakukan adalah dengan terus menekan angka mengulang dan angka putus sekolah serta menaikkan angka melanjutkan sekolah. Pada tahun 2016, tercatat di Kabupaten Tegal Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 0,06%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 0.06% dan pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 0.02. Pada jenjang SD, SMP dan setingkat SMA Angka putus sekolah ditahun 2016 menunjukkan penurunan bila di bandingkan dengan kondisi angka putus sekolah di Tahun 2015, Hal ini terutama terjadi di wilayah industri dan daerah pantai dikarenakan pada wilayah tersebut anak usia sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, membantu orang tua mencari nafkah. Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus mendorong anak-anak usia sekolah untuk

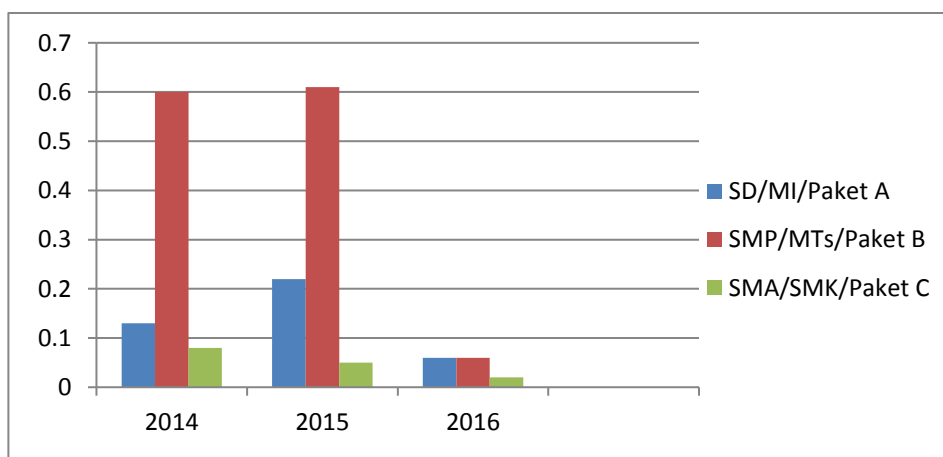
terus berada dan belajar pada lembaga/satuan pendidikan formal. Untuk itu, pemerintah akan terus melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah agar anak-anak bangsa yang berusia sekolah dan berada di Kabupaten Tegal terjamin untuk mendapatkan pendidikan pada lembaga / satuan pendidikan formal. Angka putus sekolah bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Angka Putus sekolah**

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	SD/MI Paket A	0.13	0.22	0.06
2	SMP/MTs/Paket B	0.60	0.61	0.06
3	SMA/SMK/MA/Paket C	0.08	0.05	0.02

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

**Gambar 2 Grafik Angka Putus Sekolah**



### 2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Indikator berikutnya adalah *APM*, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. *APM* digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Sedangkan *APK* didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. *APK* digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang

bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah.

APM dan APK merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu strategi dalam pembangunan pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis.

Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen dan elemen masyarakat. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua masyarakat melalui pendidikan.

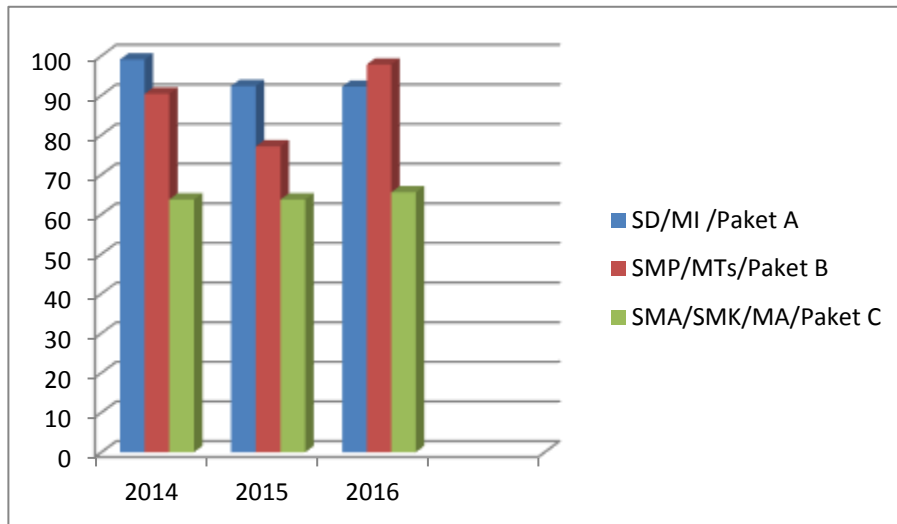
Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal telah dan akan terus melakukan berbagai upaya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Perkembangan APK dan APM jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/Paket C di Kabupaten Tegal, tergambar seperti pada Tabel 2.3. berikut ini.

**Tabel 2.3 Perkembangan APM dan APK**

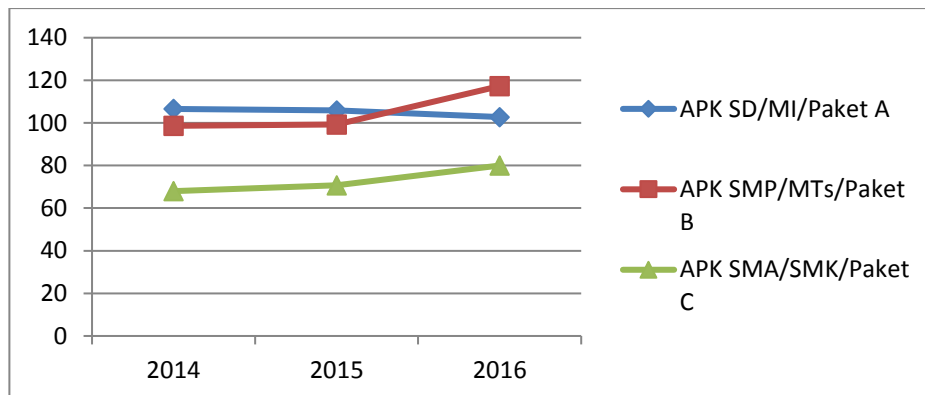
NO	URAIAN	TARGET KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Murni								
	SD/MI/Paket A	99,20	99,50	99,98	94,00	94,64	99,07	92,36	92,22
	SMP/MTs/Paket B	59,01	60,68	91,20	90,74	88,95	90,42	77,16	97,80
	SMA/SMK/Paket C	52,9	54,2	55,00	56,04	52,18	63,75	63,75	65,55
2	Angka Partisipasi Kasar								
	SD/MI/Paket A	109,73	109,90	110	105	109,40	106,56	105,9	102,77
	SMP/MTs/Paket B	99,05	100	100,9	96,28	94,28	98,65	99,28	117,28
	SMA/SMK/Paket C	61,77	61,82	63,13	61,85	58,69	67,98	70,77	80,01

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

**Gambar 3 Grafik Capaian APM Dinas Dikbud Kabupaten Tegal**



**Gambar 4 Grafik Capaian APK Dinas Dikbud Kabupaten Tegal**



Pencapaian APM SD/MI/Paket A Tahun 2016 Belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni angka capaian 92.22% dari target sebesar 94.00%. Pencapaian APM SMP/Mts/Paket B Tahun 2016 memenuhi atau mencapai target, yaitu 97.80% dari target 90,74%. Selanjutnya, pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, APM jenjang ini juga mengalami perubahan / fluktuasi, yaitu 55.00% target pada tahun 2016 dan 65,55% pada capaian tahun 2016.

Pada periode yang sama, APK SD/MI/Paket A juga mengalami fluktuasi dari target 105% dengan capaian 102.77,%. Terkait dengan pencapaian realisasi di Tahun 2016, pada jenjang SMP/MTs/Paket B belum memenuhi target yang telah ditentukan, yakni 100.09 % dari target 2016 dan capaian 2016 sebesar 117.28% .

Perubahan/fluktuasi juga terjadi pada pencapaian APK jenjang SMA/MA/SMK/Paket C. Pada Tahun 2016, APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 61.85% target 2016 dan capaian 2016 capaian APK SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 80.01%.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Tegal juga telah memperhatikan gender. Artinya, pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal tidak membedakan jenis kelamin. Seluruh anak bangsa yang berada di Kabupaten Tegal berhak untuk mendapatkan pendidikan dan belajar di satuan pendidikan formal dimana tingkat partisipasi penduduk usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan tampak berimbang.

### **2.2.3. Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekurang-kurangnya S1/DIV.**

Indikator ini biasanya disebut dengan Persentase Guru Menurut Ijazah Tertinggi, dan masuk jenis indikator Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan. Sejalan dengan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu untuk semua jenjang pendidikan melalui persekolahan dan nonformal dan informal juga dilaksanakan. Mutu atau kualitas adalah sesuatu yang dianggap baik karena memenuhi suatu standar tertentu. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan menuju sesuatu yang baik atau standar tertentu. Peningkatan mutu dapat dilaksanakan pada masukan dan keluaran, proses, guru, sarana/prasarana dan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.

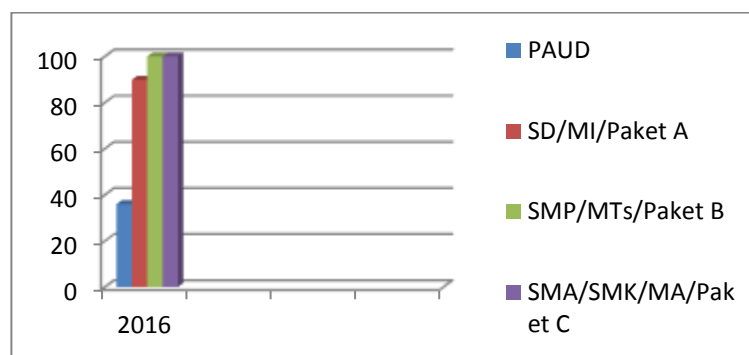
Mutu dapat ditingkatkan apabila proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif sehingga peserta didik dapat mengalami proses belajar mengajar yang berarti dan ditunjang oleh sumber daya seperti guru, sarana/prasarana, dan biaya yang memadai. Proses belajar yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang mampu belajar terus menerus sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

Relevansi pendidikan di tingkat sekolah menengah (SM) diarahkan untuk melihat kesesuaian antara pendidikan di sekolah dengan lapangan usaha setelah mereka lulus sehingga mereka mampu menjadi tenaga pekerja terampil tingkat

menengah.

Indikator persentase guru menurut ijazah tertinggi didefinisikan sebagai perbandingan antara guru dengan ijazah tertentu yang dimiliki pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Namun, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal, indikator ini lebih melihat seberapa besar jumlah Guru (**Tenaga Pendidik**) yang telah memiliki kualifikasi Sarjana atau Diploma IV. Dengan jumlah seluruh Tenaga Pendidik (tidak termasuk **Tenaga Kependidikan**) dari jenjang TK/PAUD Guru PNS sejumlah 104 Orang berklasifikasi S1/DIV sejumlah 78 orang atau 75 %. Jenjang SD Guru PNS sebanyak 8.782 Orang ,6.282 orang diantaranya berkualifikasi S1/DIV atau 71,53 %. Jenjang SMP terdapat pendidik /Guru PNS sebanyak 2.367 dan 2.146 berkualifikasi S1/D IV atau 90.66%. Jenjang SMA/SMK jumlah guru PNS sebanyak 764. 736 berkualifikasi S1/DIV atau berkisar 96.33%.

**Gambar 5 Grafik Keberadaan Guru menurut status kepegawaian, jenjang pendidikan**



Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2016 menargetkan 64.5 % atau 7.691 Tenaga Pendidik sudah berkualifikasi Diploma IV / S1. Kondisi riil di tahun 2016 sebanyak 10.016 orang Tenaga Pendidik telah memiliki kualifikasi Sarjana / Diploma IV. Sehingga target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal telah tercapai, dengan capaian sebesar 129,68%.

Adapun sebaran jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan jenjang pendidikannya dimana pendidik dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana / Diploma IV terbesar berada pada jenjang Sekolah Dasar. Berikutnya adalah

SMP, SMA/MA dan paling sedikit berada pada jenjang PAUDNI.

Menjadi tugas Pemerintah untuk terus mendorong dan memberikan kesempatan pada seluruh Tenaga Pendidik untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya, minimal setara Sarjana / Diploma IV

Secara keseluruhan, terdapat 2.749 Tenaga Pendidik lagi yang belum memperoleh Sarjana / Diploma IV. Namun, dari jumlah tersebut, 110 orang Tenaga Pendidik saat ini sedang mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan Sarjana / Diploma IV.

Berbicara Tenaga Pendidik maka akan berbicara tentang kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi berkenaan dengan latar belakang pendidikan si Tenaga Pendidik. Sedangkan berbicara kompetensi maka akan berkaitan sangat erat dengan profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 maka profesionalisme Tenaga Pendidik ditandai dengan diberikannya sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru / tenaga pendidik sebagai tenaga professional.

Dengan peningkatan status guru / tenaga pendidik sebagai tenaga professional maka kompetensi merupakan langkah penting yang perlu ditingkatkan. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi guru-guru untuk dapat mengembangkan kompetensi. Tetapi tidak mustahil menjadi hambatan bagi guru-guru yang memiliki kompetensi rendah.

#### **2.2.4. Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar / Sederajat (%) dalam Kategori Baik.**

Indikator ini merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Indikator ini didefinisikan sebagai rasio jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar sederajat dalam kategori baik pada setiap 100 orang murid / siswa dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak tersedianya satuan pendidikan SD sederajat pada

setiap 100 orang murid / siswa. Begitu juga halnya dengan indikator **Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat (%) dalam Kategori Baik** dan **Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat (%) dalam Kategori Baik**, juga memiliki definisi yang sama namun berbeda satuan pendidikan. seperti yang terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4 Kondisi Gedung Sekolah**

No	Jenjang	Jumlah Gedung Sekolah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	TK/PAUD	282	282	0
2	SD	749	749	0
3	SMP	98	98	0
4	SMA/SMK	89	89	0

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa Rasio Ketersediaan SD / Sederajat Dalam Kategori Baik telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2016. Jumlah Gedung TK/PAUD sebanyak 282 Sekolah dengan kategori baik/layak sebanyak 282 dengan jumlah penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD) sebanyak 72.381 maka ratio ketersediaan pelayanan PAUD dibanding dengan jumlah penduduk usia sebesar 1 : 256 .

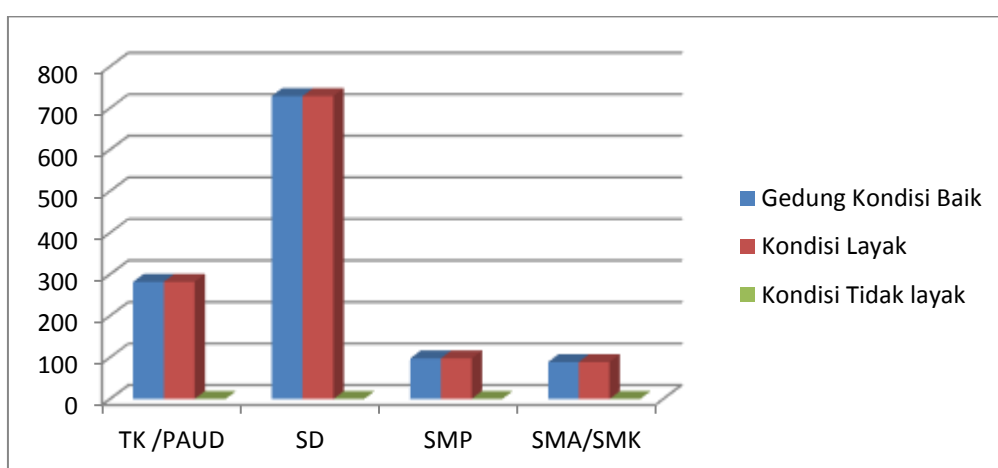
Jumlah Gedung SD sederajat sebanyak 749 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) sebanyak 154.827 orang maka Rasio Ketersediaan SD / Sederajat dalam kategori baik sebesar 1 : 206.

Adapun Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat dalam kategori baik memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2016. Dengan jumlah SMP sederajat sebanyak 98 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia SMP (13-15 tahun) sebanyak 31.288 orang maka Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat

1: 319.

Pada jenjang SMA/SMK sederajat, Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat Dalam Kategori Baik juga memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2016. Dengan jumlah SMA/SMK sederajat sebanyak 89 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia SMA /SMK (16-18 tahun) sebanyak 31.454 orang maka Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat Dalam Kategori Baik sebesar 1:353

**Gambar 6 Grafik Kondisi Gedung Sekolah**



Berdasarkan fakta yang terlihat seperti diatas, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Hal ini dilakukan dengan menambah Ruang Kelas Baru (RKB) pada sekolah-sekolah yang sudah ada dan Rehab bangunan ruang kelas yang dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Hal ini mengingat, apabila mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) maka akan dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu dan tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Terkait dengan pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal tidak hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal, tetapi juga yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Bankeu Prov) dan APBN dalam bentuk Blockgrant.

Pada Gambar 7 (Sarana dan prasarana pendidikan yang dibangun melalui

APBN) tampak beberapa sarana dan prasarana pendidikan, baik pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan Perpustakaan maupun Rehabilitasi Ruang Kelas yang pembiayaannya melalui APBN dengan pola blockgrant dan dilaksanakan dengan metode swakelola oleh Komite Sekolah.

**Gambar 7**

Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Dibangun Melalui APBN di Kabupaten Tegal Tahun 2016



**2.2.5. Angka Melek Huruf (AMH).**

Indikator lain yang dapat menggambarkan perkembangan pendidikan di Kabupaten Tegal adalah Angka Melek Huruf yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang melek huruf dengan penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilai angka melek huruf berarti semakin baik kualitas penduduk di suatu daerah. Angka Melek Huruf juga bisa diartikan sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis.

Kemampuan membaca dan menulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, supaya memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegunaan Angka Melek Huruf adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang bisa membaca dan menulis di suatu daerah sehingga dapat diketahui berapa besar jumlah penduduk yang masih buta huruf, sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya melalui berbagai kebijakan di bidang

pendidikan.

Angka Melek Huruf juga digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia, yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan Kabupaten dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

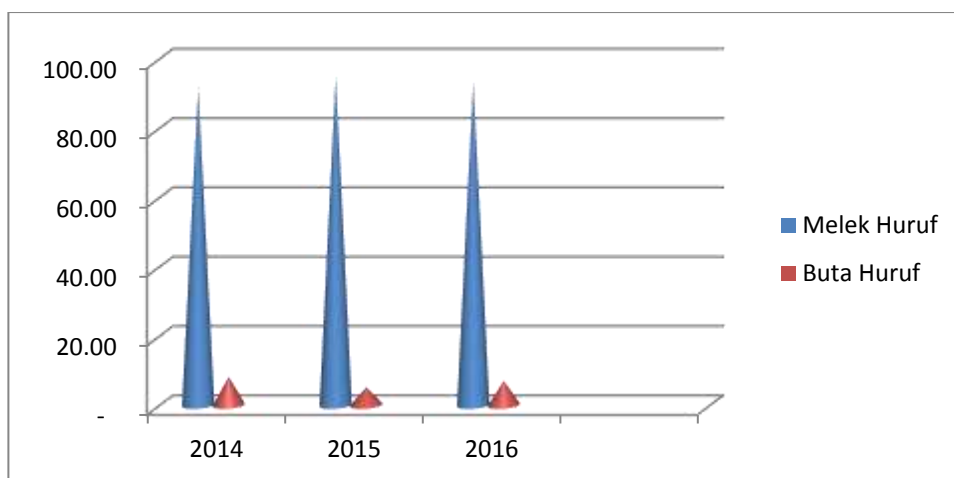
Sama halnya dengan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf juga merupakan indikator nonpendidikan yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan. Oleh karena itu Angka Melek Huruf tidak dapat dipisahkan dari data pendidikan yang ada, melainkan sebagai pelengkap atau penunjang data pendidikan yang ada. Dari Tabel 2.16. berikut ini, tampak bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun semakin meningkat.

**Tabel 2.5 Angka Melek Huruf**

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Angka Melek Huruf Usia >45 Tahun	91.80	94.80	93.00

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

**Gambar 8. Grafik Capaian Angka melek huruf Usia >45 Tahun**



Pada tahun 2012 AMH Kabupaten Tegal sebesar 88,08% meningkat di Tahun 2013 sebesar 89,01%, meningkat lagi di tahun 2014 sebesar 91,80% hingga pada tahun 2015 meningkat menjadi 94,80%. Di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 93,00% sehingga terjadi kenaikan warga buta aksara sebesar 1,80% dibanding tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tegal mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, jumlah penduduk di Kabupaten Tegal yang masih mengalami buta huruf sebanyak 7,00% di akhir tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus berupaya dan bekerja keras agar seluruh penduduk yang masih buta huruf dapat dituntaskan. Berbagai program pembangunan telah dan akan terus dilakukan, diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Program-program ini diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Inklusif dan lain sebagainya. Tidak hanya menyelenggarakan melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal, Pemerintah akan turun ke lapangan dan mendekati dengan kantong-kantong penduduk yang teridentifikasi masih terdapat buta huruf. Tak terkecuali, pemerintah Kabupaten Tegal juga menyelenggarakan Penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Lembaga Masyarakat (Lapas) Tegal Andong Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bukti akan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Indikator Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah merupakan

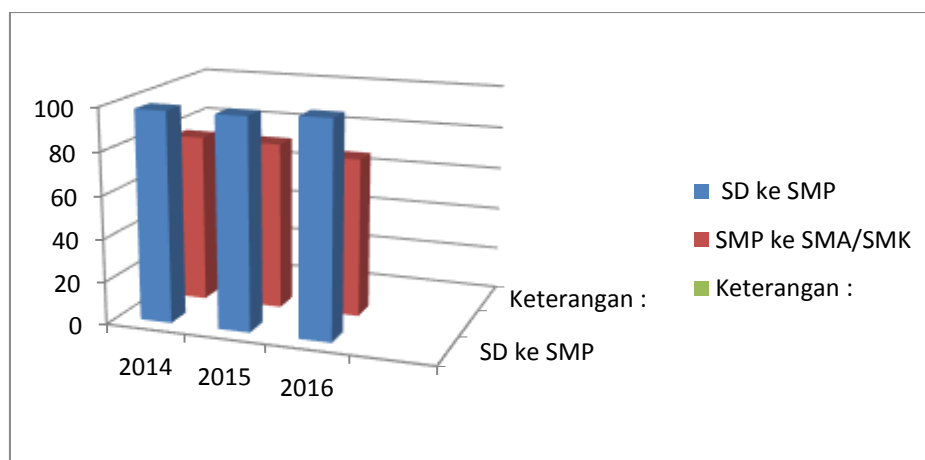
dua indikator pendidikan yang memiliki kontribusi pada penghitungan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)***. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sabagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan indeks standar hidup layak. ‘‘

#### **2.2.6. Angka Melanjutkan (AM) Pendidikan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi.**

Indikator lain adalah Angka Melanjutkan (AM) Pendidikan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi. Dari Gambar 9 angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, memperlihatkan angka melanjutkan yang mengalami fluktuasi.

Untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dasar (SD) mengalami peningkatan menjadi angka 99.79 % ditahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat 98.07%. Sedangkan untuk angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berada di angka 74% ditahun 2016 , lebih rendah dari Tahun 2015 sebesar 78.16 %. Usaha peningkatan angka melanjutkan ini ditunjang dengan penyediaan ruang-ruang kelas baru yang menjamin ketersediaan ruang kelas sebagai tempat belajar dan semakin tingginya perhatian pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan penduduknya melalui bantuan dalam bentuk subsidi maupun beasiswa khususnya bagi penduduk tidak mampu. Apalagi saat ini pemerintah tidak hanya memberikan program BOS pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat tetapi juga sudah mencapai jenjang SMA sederajat.

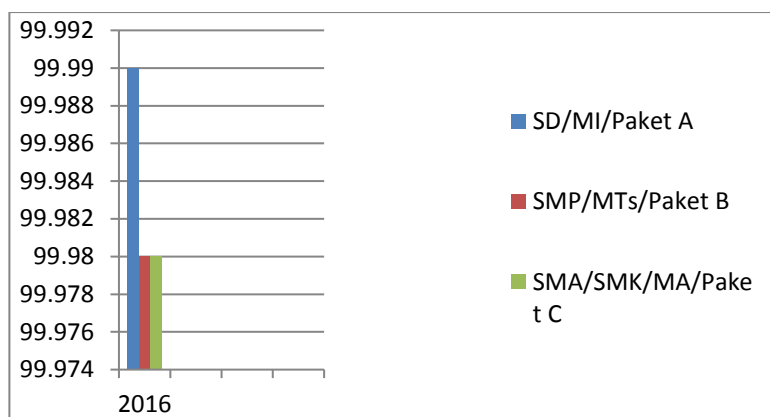
**Gambar 9 Grafik Angka Melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA.**



### 2.2.7. Angka Lulusan (AL).

Indikator terakhir pada bidang pendidikan adalah Angka Lulusan yang merupakan bagian indikator mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Angka Lulusan didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya atau mencapai angka ideal 100% maka semua siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya. Angka lulusan ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah. Selain sebagai indikator Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, angka lulusan juga merupakan indikator *MDGs* (*Millenium Development Goals*).

Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan angka lulusan hingga mencapai angka ideal yaitu 100%. Upaya itu antara lain dengan menyelenggarakan try out ujian nasional sebagai persiapan anak-anak kelas tertinggi di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menghadapi ujian nasional. Selain itu juga dilaksanakan pemantapan psikologis agar secara mental siap mengikuti ujian nasional. Angka lulusan tingkat SD/MI di tahun 2016 mencapai angka lulusan sebesar 99,99 %, Tingkat SMP/MTs berada di angka 99,98 % dan untuk tingkat sekolah SMA/SMK/MA berada di angka 99,98 % di Tahun 2016



**Gambar 10. Grafik Angka Lulusan Jenjang SD SMP dan SM**

### 2.2.8 Persentase Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Sesuai SPM

NO	URAIAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2015	2016	2015	2016
1	Ruang Kelas SD/MI Sesuai SPM	70	90	79	80
2	Ruang Kelas SMP/MTs	60	73	72	80
3	Ruang Kelas SMA/SMK/MA	84.84	85.65	100	100

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Pendidikan Dasar sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan program, dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan jumlah sekolah SD/MI sejumlah 749 Sekolah dari target 90 % ditahun 2016 capaian kinerja realisasi tahun 2016 sejumlah 80 % atau 600 Sekolah dalam kondisi sesuai dengan standart SPM, 10 % atau 149 sekolah SD/MI belum sesuai dengan SPM.

Target Ruang Kelas SMP/MTs sesuai dengan standar SPM di Tahun 2016 sebesar 73%, Realisasi di tahun 2016 sebesar 80 % atau sekitar 78 sekolah dari 98 jumlah keseluruhan sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tegal.

Ruang kelas SMA/SMK/MA menduduki tingkat tertinggi dari standar SPM yang ada yaitu 100% atau sekitar 89 sekolah dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Tegal di Tahun 2016 telah memenuhi standart SPM.

### 2.2.9 Persentase SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK/MA Memiliki Sanitasi yang layak

NO	URAIAN	TARGET	CAPAIAN
----	--------	--------	---------

		KINERJA		KINERJA	
		2015	2016	2015	2016
1	Prosentase SD/MI Memiliki sanitasi layak	35.4	41	25.95	40
2	Prosentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	10	14	12	13
3	Prosentase SMA/SMK/MA memiliki sanitasi layak	12	15	20	22

Sesuai dengan indikator standar pelayanan minimal, tentang kondisi sekolah yang memiliki sanitasi yang layak di tahun 2016 Prosentasi SD/MI yang memiliki sanitasi layak sejumlah 40 % atau sekitar 299 Sekolah. Sebaliknya sekitar 450 Sekolah belum memiliki sanitasi yang layak.

Tingkat SMP/MTs di tahun 2016 hanya sekitar 13% atau 13 sekolah yang memiliki sanitasi layak. Sebaliknya sekitar 85 sekolah belum memiliki sanitasi layak.

Tingkat SMA/SMK/MA hanya 22 % atau sekitar 20 Sekolah yang memiliki sanitasi layak sesuai dengan SPM atau rasio keberadaan siswa dengan keberadaan dengan ruang sanitasi. Sebaliknya sekitar 69 sekolah SMA/SMK/MA sekolah belum memiliki sanitasi yang layak.

Tingkat kelayakan sanitasi yang ada diukur berdasarkan rasio keberadaan siswa dengan tersedianya ruang sanitasi sekolah yang ada. Pada dasarnya setiap sekolah telah mempunyai ruang sanitasi, namun belum sesuai dengan kondisi SPM dan tingkat Rasio.

## 2.2.8. Capaian Bidang Pemuda Dan Olahraga

Tabel 2.6 Capaian Bidang Pemuda dan olahraga

NO	URAIAN	TARGET KINERJA			CAPAIAN KINERJA		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Jumlah Klub Olahraga	25	30	35	365	365	365
2	Jumlah Gedung Olahraga	9	12	15	273	273	273
3	Jumlah Kegiatan Olahraga	12	15	17	2	2	2

Adapun capaian bidang pemuda dan olahraga di tahun 2016 untuk jumlah klub olahraga sudah memenuhi target sebanyak 365 klub olahraga yang ada di masyarakat dan di sekolah-sekolah. Keberadaan gedung olahraga yang ada di sekolah dan di masyarakat sudah memenuhi target dari target kinerja 12 gedung di tahun 2016 sebanyak 273 Gedung olahraga yang ada di sekolah dan masyarakat. Jumlah kegiatan

olahraga menurun dari target 15 kegiatan olahraga pertahun menjadi 2 kegiatan olahraga.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Penyusunan visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal tidak dapat terlepas dari Visi Bupati sebagai janji yang akan dicapai dalam masa jabatannya. Visi dan misi Bupati Tegal masa jabatan 2015 - 2018 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera.”**

**“Cinta Desa,CintaRakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”**

Untuk mencapai tujuan dari Visi Bupati/Wakil Bupati periode 2015 - 2018, maka dijabarkan dalam bentuk Arti visi sebagai berikut :

Mandiri	: Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing.
Unggul	: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehinggamenjadi masyarakat yang unggul
Berbudaya	: Masyarakat memilki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Religius	: Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa
Sejahtera	: Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.**
- 2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.**

3. **Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.**
4. **Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.**
5. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .**

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai kerangka agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan sistem yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Kerangka pembangunan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sistem Inovasi Daerah adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

1. **Kerangka umum bagi inovasi,**

yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi. Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi di daerah.

**2. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorpsi dunia usaha,**

yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara sementara atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara melekat dan menjalankan fungsi koordinasi. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.

**3. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi,**

yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang. Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Penelitian dan pengembangan yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya penelitian dan pengembangan tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada dan atau

dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsiserta difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.

4. **Budaya inovasi**

yaitu membangun budaya inovasi Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.

5. **Sistem inovasi dan klaster industri,**

yaitu menumbuh kembangkan sistem inovasi dan menumbuh kembangkan klaster (industri) nasional dan daerah Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.

6. **Perkembangan dunia,**

yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.

7. **Afirmasi wilayah,**

yaitu pengembangan wilayah tertinggal Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan

merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generik sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.

#### 8. **Afirmasi pengungkit,**

yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain *telecenter* dan pemerintahan berbasis elektronik.

Delapan agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD merupakan kerangka kebijakan. Dalam struktur (hierarki) perencanaan strategis (*strategic planning*), yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam kerangka pembangunan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, Sistem Inovasi Daerah melingkupi RPJMD ini secara keseluruhan sebagai pendekatan siklus pembangunan. Sebagai kerangka pembangunan yang melingkupi RPJMD, telah diidentifikasi 9 (Sembilan) kerangka pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka pembangunan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan kebijakan unggulan pemerintah daerah yaitu Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal.

Kerangka pembangunan tersebut adalah:

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Desa

##### 1. Kebijakan Cinta Desa

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat

1. Reformasi Birokrasi (Cinta Rakyat)
2. Permukiman Kreatif (Cinta Rakyat)

#### Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Produk Tegal

1. Industri Permesinan (Cinta Produk Tegal)
2. Industri Pertanian (Cinta Produk Tegal)

#### Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

1. Ekonomi Berbasis Seni Budaya (Cinta Budaya)
2. Budaya Rukun dan Toleran (Cinta Budaya)
3. Wisata Purbakala (Cinta Budaya)
4. Pengobatan Alami (Cinta Budaya)

Masing-masing kebijakan unggulan yang dijabarkan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

#### **1. Cinta Desa**

Cinta Desa merupakan kebijakan pembangunan yang bertitiktolak dari pendekatan spasial di desa. Cinta Desa tidak hanya ingin menjadikan desa sebagai lokus pembangunan, tetapi juga menjadikan desa sebagai pelaku pembangunan yang merumuskan sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Untuk mewujudkan desa sebagai wilayah sekaligus pelaku pembangunan dilakukan serangkaian perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
  - 1) Merumuskan kebijakan pembangunan desa
  - 2) Mengalokasikan anggaran pembangunan desa
  - 3) Penguatan kewenangan pembangunan desa
  - 4) Peningkatan akses infratraktur desa dan antardesa
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
  - 1) Penguatan peran kelembagaan desa
  - 2) Studi komparasi desa maju

- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
  - 1) *Sister village*
  - 2) Alih pengetahuan asosiasi pemerintah desa
- d. Membangun budaya inovasi
  - 1) Peningkatan akses masyarakat desa dalam forum perencanaan daerah (Forum SKPD, Badan Anggaran)
  - 2) Penjaminan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan
  - 3) Masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
  - 1) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa
  - 2) Peningkatan kapasitas pengurus dan kelembagaan pemerintahan desa
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
  - 1) Pemastian angka ketercapaian MDG's (kemiskinan, pendidikan untuk semua, kesehatan ibu dan anak).
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
  - 1) Memutus keterisoliran desa tertinggal
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
  - 1) Inisiasi pelayanan pemerintahan desa secara elektronik
  - 2) Perluasan akses elektronik terhadap data pembangunan desa

Peningkatan kinerja pelayanan menjadi sangat penting mengingat bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan kebudayaan.
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal dan nonformal;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk serta arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi unit kerja di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
- f. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan
- g. Membina, mengawasi dan menilai kinerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional (membuat dan menandatangani Laporan Evaluasi Kinerja).
- h. Pembinaan dan pengurusan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Usaha Wajib Belajar;
- i. Pembinaan dan pengurusan pendidikan non formal dan informal, pembinaan generasi muda termasuk pembinaan kegiatan kebudayaan.
- j. Pemberian layanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
  - o. Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
3. Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, menggerakkan, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan dalam bidang pelayanan teknis dan administratif Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Memberi petunjuk dan melakukan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Pengawas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Menyusun saran alternatif di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati;
  - f. Menyusun usul alokasi pembiayaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan teknologi informasi;
  - g. Memberikan layanan informasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ;
  - h. Menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan urusan wajib yang mendapat porsi otonomi daerah yang luas. Tuntutan atas layanan pendidikan yang prima, khususnya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Tegal mengharuskan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Organisasi untuk siap dan mampu menjawab seluruh tuntutan masyarakat, yang semakin hari semakin tinggi permintaannya.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui konsep perencanaan partisipatif, yaitu suatu tahapan perencanaan yang dilakukan melalui : 1) proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan komunitas terkecil (lingkungan sekolah) secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan; 2) proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) yang dimulai dari peninjauan kebutuhan/permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan yang diharapkan; dan 3) proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka.

Perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal menganut azas perencanaan partisipatif, dipilih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dikarenakan perencanaan partisipatif memiliki manfaat, diantaranya : a) Bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka dan juga untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi); b) Dengan adanya *partisipasi masyarakat* dalam melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif akan mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Adapun metode pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan melalui perencanaan partisipatif yaitu melalui penerimaan usulan pada saat Anggota Legislatif (DPRD Kabupaten Tegal) melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya masing-masing saat masa reses DPRD. Selain itu, usulan program dan kegiatan juga diterima pada saat Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Tegal. Dengan fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten Tegal, usulan program dan kegiatan juga diterima, baik pada tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) maupun tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Usulan program dan kegiatan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal melalui forum-forum sebagaimana yang disebutkan.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah**

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah” **“Terwujudnya pelayanan prima Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Cerdas, Produktif, Berakhlak Mulia dan Berprestasi”**.

Dalam rangka mewujudkan dan menjabarkan visi tersebut diatas maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tegal mengembangkan **“Misi”** sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola, pencitraan publik, tata nilai penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan yang baik, serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan dasar yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Mewujudkan dukungan sustainabilitas (berkelanjutan) lulusan pendidikan dasar ke

sekolah menengah dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan menengah yang variatif dan kreatif.

4. Mewujudkan peningkatan kompetensi teknis, sosial, personal, manajerial dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Mewujudkan kualitas/mutu pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.
6. Mewujudkan keberlanjutan even kebudayaan dan pemeliharaan cagar benda budaya.

Upaya-upaya pencapaian Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelaksanaan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Kabupaten . Visi dan misi Bupati Tegal masa jabatan 2014 - 2019 adalah sebagai berikut

**“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera. “Cinta Desa,Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”**

Untuk mencapai tujuan dari VisiBupati/Wakil Bupati periode 2014 - 2019, maka dijabarkan dalam bentuk Arti visi sebagai berikut :

- |           |  |
|-----------|--|
| Mandiri   | : Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing.  |
| Unggul    | : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehinggamenjadi masyarakat yang unggul  |
| Berbudaya | : Masyarakat memilki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa  |
| Religius  | : Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Sejahtera | : Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata.                                 |

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.**
- 2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.**
- 3. Mewujudkan kehidupan *paceduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.**
- 4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.**
- 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .**

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai kerangka agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan sistem yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan sistem inovasi daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Kerangka pembangunan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sistem inovasi daerah adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat

bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

**1. Kerangka umum bagi inovasi,**

yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi. Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi di daerah.

**2. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorpsi dunia usaha,**

yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara sementara atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara melekat dan menjalankan fungsi koordinasi. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.

**3. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi,**

yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang. Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah.

Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus

pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Penelitian dan pengembangan yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya penelitian dan pengembangan tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada dan atau dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsiserta difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.

#### **4. Budaya inovasi**

yaitu membangun budaya inovasi Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.

#### **5. Sistem inovasi dan klaster industri,**

yaitu menumbuh kembangkan sistem inovasi dan menumbuh kembangkan klaster (industri) nasional dan daerah Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.

#### **6. Perkembangan dunia,**

yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak

menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.

#### **7. Afirmasi wilayah,**

yaitu pengembangan wilayah tertinggal Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generik sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.

#### **8. Afirmasi pengungkit,**

yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain *telecenter* dan pemerintahan berbasis elektronik.

Delapan agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD merupakan kerangka kebijakan. Dalam struktur (hierarki) perencanaan strategis (*strategic planning*), yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam kerangka pembangunan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, Sistem Inovasi Daerah melingkupi RPJMD ini secara keseluruhan sebagai pendekatan siklus pembangunan. Sebagai kerangka pembangunan yang melingkupi RPJMD, telah diidentifikasi 9 (Sembilan) kerangka pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka pembangunan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan kebijakan unggulan pemerintah daerah yaitu

Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal.

Kerangka pembangunan tersebut adalah:

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Desa

1. Kebijakan Cinta Desa

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat

1. Reformasi Birokrasi (Cinta Rakyat)
2. Permukiman Kreatif (Cinta Rakyat)

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Produk Tegal

1. Industri Permesinan (Cinta Produk Tegal)
2. Industri Pertanian (Cinta Produk Tegal)

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

1. Ekonomi Berbasis Seni Budaya (Cinta Budaya)
2. Budaya Rukun dan Toleran (Cinta Budaya)
3. Wisata Purbakala (Cinta Budaya)
4. Pengobatan Alami (Cinta Budaya)

Masing-masing kebijakan unggulan yang dijabarkan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

#### **Cinta Desa**

Cinta Desa merupakan kebijakan pembangunan yang bertitiktolak dari pendekatan spasial di desa. Cinta Desa tidak hanya ingin menjadikan desa sebagai lokus pembangunan, tetapi juga menjadikan desa sebagai pelaku pembangunan yang merumuskan sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Untuk mewujudkan desa sebagai wilayah sekaligus pelaku pembangunan dilakukan serangkaian perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
  - 1) Merumuskan kebijakan pembangunan desa
  - 2) Mengalokasikan anggaran pembangunan desa
  - 3) Penguatan kewenangan pembangunan desa
  - 4) Peningkatan akses infratraktur desa dan antardesa

- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
  - 1) Penguatan peran kelembagaan desa
  - 2) Studi komparasi desa maju
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
  - 1) Sister village
  - 2) Alih pengetahuan asosiasi pemerintah desa
- d. Membangun budaya inovasi
  - 1) Peningkatan akses masyarakat desa dalam forum perencanaan daerah (Forum SKPD, Badan Anggaran)
  - 2) Penjaminan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan
  - 3) Masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
  - 1) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa
  - 2) Peningkatan kapasitas pengurus dan kelembagaan pemerintahan desa
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
  - 1) Pemastian angka ketercapaian MDG's (kemiskinan, pendidikan untuk semua, kesehatan ibu dan anak).
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
  - 1) Memutus keterisoliran desa tertinggal
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
  - 1) Inisiasi pelayanan pemerintahan desa secara elektronik
  - 2) Perluasan akses elektronik terhadap data pembangunan desa

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal juga memperhatikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya Pembangunan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan

kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna), yaitu insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal**

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut maka fokus pembangunan pendidikan pada Tahun 2014 – 2019 adalah penguatan pelayanan pendidikan. Hal ini tergambar pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif. Layanan prima pendidikan nasional yang dimaksud adalah adalah layanan pendidikan yang (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; (4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan (5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Hal ini dikemas dalam Misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu :

1. Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan;
2. Memperluas **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan;
3. Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan;
4. Mewujudkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan; dan
5. Menjamin **Kepastian** Memperoleh Layanan Pendidikan

Berdasarkan identifikasi permasalahan , telaahan visi dan misi Bupati Tegal terpilih serta telaahan terhadap rencana strategis, pembangunan pendidikan dan kebudayaan maka dapat di tentukan isu yang dapat dijadikan fokus pembagunan pendidikan lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan.
3. Masih rendahnya lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah atas.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas sumber daya manusia terampil, potensial, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulusan ujian nasional masih dibawah rata-rata provinsi / nasional.
6. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standart kompetensi dan standart pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.
7. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, social, akademik, dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter, dan berwawasan, lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal diseluruh jenjang pendidikan dari pendidikan PAUD , pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Belum tergalinya budaya lokal Tegal dan kurang optimalnya pemeliharaan benda cagar budaya di Kabupaten Tegal.

9. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan dan kebudayaan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan dan kebudayaan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan dan kebudayaan.

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan pendidikan beberapa telaah Rencana Strategis yang dapat disimpulkan dalam rencana kerja pembangunan pendidikan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata terjangkau setara dan berkeadilan di setiap desa.
2. Peningkatan layanan kepastian dan jaminan Pendidikan Dasar yang bermutu merata, terjangkau, setara dan relevan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal.
3. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas.
4. Peningkatan layanan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal.
5. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan persentase siswa lulus ujian nasional, dengan rata-rata nilai yang baik serta peningkatan prestasi belajar dan akademik.
6. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart kompetensi dan standart pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Peningkatan layanan pendidikan kecakapan hidup (*Life Skill*) yang mencakup kecakapan personal, social, akademik, dan vocational, dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas produktif, berkarakter dan

berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan.

8. Peningkatan pembinaan pelaku seni dan pemeliharaan benda cagar budaya di Kabupaten Tegal
9. Peningkatan penyelenggaraan system tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan.

Mendasari pada permasalahan-permasalahan diatas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh Kecamatan;
3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah;
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
5. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal;
6. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal;
7. Mengembangkan dan meningkatkan seni dan even kesenian dan memelihara benda cagar budaya di Kabupaten Tegal;
8. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan dengan mengedepankan konsep manajemen berbasis sekolah;
9. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan terobosan sesuai dengan

tuntutan perkembangan secara keseluruhan baik nasional, global maupun internasional. Hal ini perlu dilakukan agar visi untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki daya saing dapat dicapai. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, antara lain mencakup :

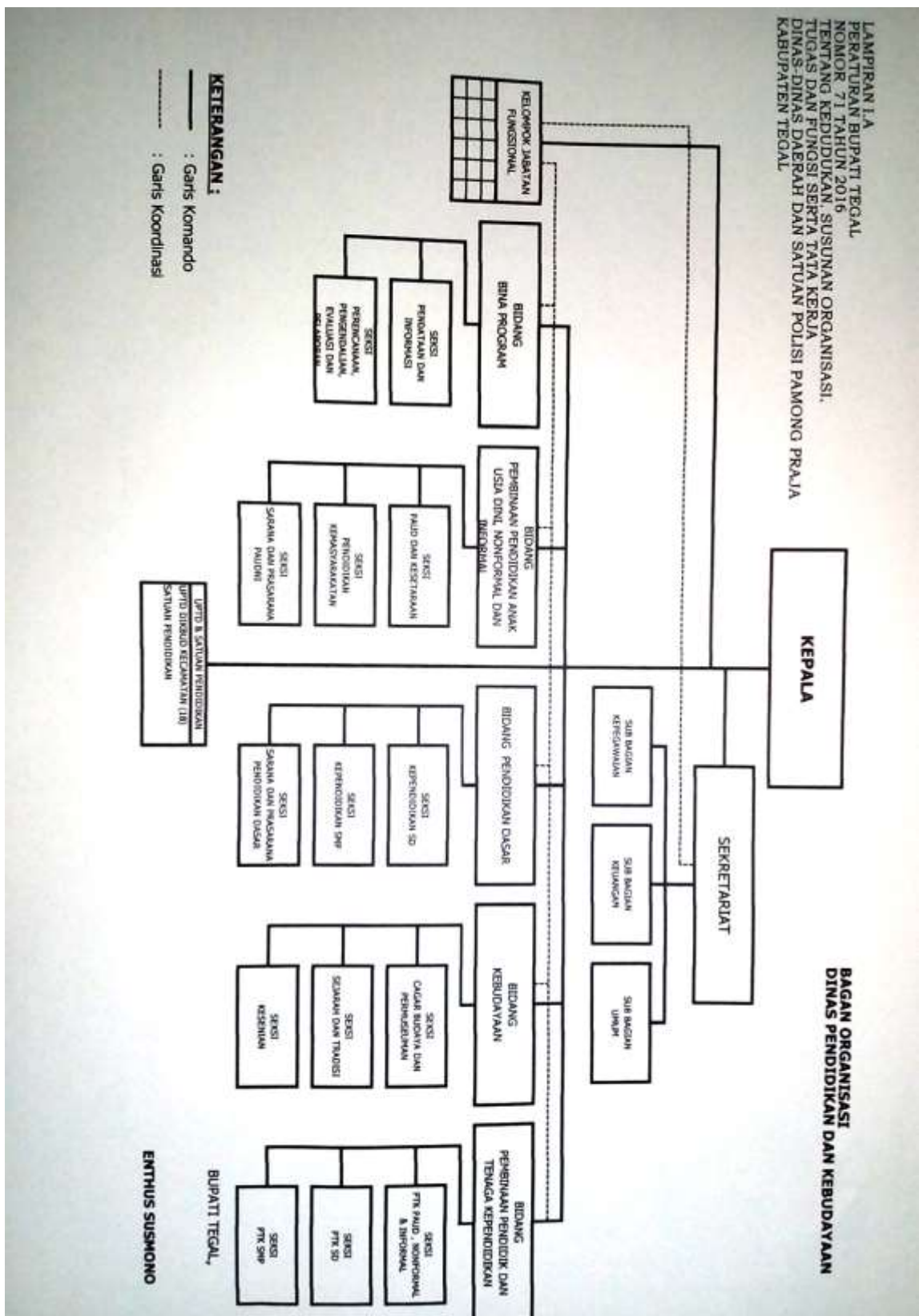
1. Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik;
2. Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya;
3. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
4. Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa;
5. Pengembangan Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha;
6. Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan;
7. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan;
8. Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan;
9. Penyediaan Buku Teks Murah;
10. Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
11. Penguatan Kemitraan Strategis antara Dunia Pendidikan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha;
12. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal;
13. Reformasi Birokrasi;
14. Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
15. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana;
16. Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;

Indikator kinerja yang akan diukur pada tahun 2018 ini merupakan indikator kinerja minimal, mengingat indikator-indikator ini tercantum dalam RPJMD. Indikator ini tidak

mewakili seluruh sasaran yang ada. Hanya mengukur 3 (tiga) sasaran saja, yaitu : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, Meningkatkan dan memadainya kualifikasi tenaga pendidik; dan Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kebudayaan.

Untuk mencapai target kinerja serta melaksanakan tugas pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal agar seluruh permasalahan dapat diatasi dan tantangan kedepan dapat dihadapi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk bisa berkerja keras, berkerja cerdas dan berkerja amanah. Untuk itu, dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang seluruh komponennya diharapkan mampu melaksanakan pembangunan pendidikan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana Gambar 10 berikut ini :

**Gambar 10**  
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal  
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016



Adapun tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, sebagaimana Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal memikul tugas dan tanggungjawab yang besar. Bupati Tegal memberikan kepercayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena melalui peran serta aktif seluruh komponen pemangku kepentingan maka pembangunan pendidikan akan berhasil. Untuk itu, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal juga bersumber dari usulan dari para pemangku kepentingan, yang disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Usulan kegiatan juga disampaikan melalui Anggota Legislatif pada saat melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan langsung, baik dari masyarakat maupun Satuan Pendidikan melalui Kepala Sekolah langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana, dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi
11. Program Pengembangan Nilai Budaya
12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sedangkan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2018 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan pendidikan, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019. Kegiatan dimaksud, selain diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN. Rekapitulasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018, tertera dalam Lampiran.

Namun, secara detail, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018, APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, APBN Tahun 2018, dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2018, dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2 Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial,

termasuk di antaranya untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kekerjaan (*employment*); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh.

Di era sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pendidikan tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi salah satu hak mendasar yang harus diterima oleh setiap manusia. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan manusia, maka akan semakin besar pula kualitas pendidikan yang diharapkan. Sekolah yang tadinya didirikan berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana tertera pada RPJMN 2015-2019, pendidikan merupakan prioritas kedua dari sebelas prioritas pembangunan. Pendidikan diharapkan memberikan andil dalam menjawab isu strategis peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pembangunan sumberdaya manusia. Di samping itu, pendidikan juga menjadi faktor inti dalam penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda yang berkompeten dan mampu menjawab kebutuhan zaman

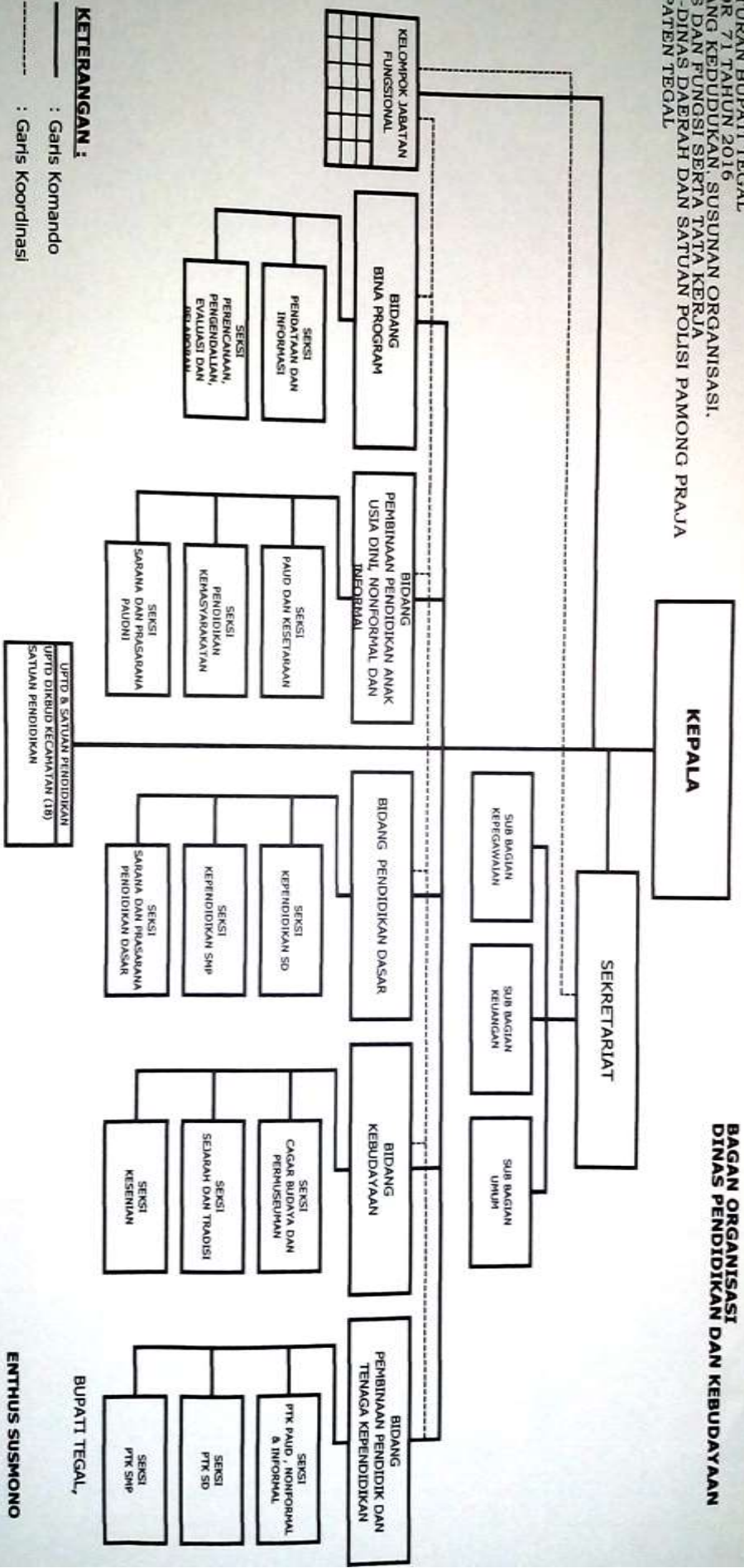
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal harus disusun sebaik mungkin dan menganut azas perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif dipilih oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

dikarenakan memiliki manfaat, diantaranya : a) Bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka serta mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi); b) Dengan adanya *partisipasi masyarakat* dalam melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif akan mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan, akan diupayakan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Tegal, APBD Provinsi Jawa Tengah , APBN maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, usulan-usulan ini akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan pada wilayahnya masing-masing. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tegal disampaikan kepada Bupati Tegal melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tegal. Program dan Kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, usulan juga disampaikan melalui Bappeda Kabupaten Tegal, yang secara kolektif akan menyampaikannya ke Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga halnya dengan program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya disulkan melalui APBN. Disampaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini disusun, dengan harapan dapat dilaksanakan semua agar tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, diucapkan terima kasih.

LAMPIRAN I A  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 71 TAHUN 2016  
 TENTANG KEBUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SEKTA TATA KERJA  
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN TEGAL



**KETERANGAN :**  
 \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

Lampiran 2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Dikbud Kab Tegal.

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PENDIDIKAN DASAR</b>												
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	190 ruang kelas SD rusak berat Rehabilitasi ruang kelas rusak berat	190 ruang	50 ruang	2,500,000,000	55 ruang	2,750,000,000	60 ruang	3,000,000,000	25 ruang	1,250,000,000	190 Ruang	237,500,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	750 ruang kelas SD rusak sedang, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang	750 ruang	100 ruang	3,500,000,000	150 ruang	5,250,000,000	250 ruang	8,750,000,000	130 ruang	4,550,000,000	120 ruang	4,200,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Jumlah rombel tidak sebanding jumlah ruang kelas, 138 ruang kelas baru SD	139 ruang	20 ruang	2,070,000,000	48 ruang	4,968,000,000	55 ruang	5,692,500,000	16 ruang	1,656,000,000	0	-
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	218 sekolah mengusulkan Pembangunan ruang Perpustakaan, Pembangunan ruang perpustakaan	218 ruang	36 ruang	4,127,400,000	54 ruang	6,137,100,000	70 ruang	8,025,500,000	30 ruang	3,439,500,000	28 ruang	3,210,200,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	MCK/WC yang layak sangat diharapkan, 419 MCK/WC kurang/tidak layak, Pemeliharaan/rehab MCK/WC 419	419 ruang	25 ruang	250,000,000	50 ruang	500,000,000	75 ruang	750,000,000	50 ruang	500,000,000	50 ruang	500,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah belum ada/rusak berat ruang guru/KS sejumlah 136 sekolah, Pembangunan ruang Guru/KS 136 SD	Ruang KS/Gr 95 ruang	10 ruang	800,000,000	15 ruang	1,200,000,000	30 ruang	2,400,000,000	20 ruang	1,600,000,000	20 ruang	1,600,000,000

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Buku Kepustakaan di 479 sekolah SD belum memadai, Pengadaan Buku Kepustakaan untuk 479 sekolah SD	buku kepustakaan 275	50	1,852,000,000	50	1,852,000,000	75	2,778,000,000	50	1,852,000,000	50	1,852,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Peralatan Pendidikan di 479 sekolah SD belum memadai, Pengadaan Peralatan untuk 479 sekolah SD	300 peralatan pendidikan	50	2,768,500,000	50	2,768,500,000	75	4,152,750,000	50	2,768,500,000	50	2,768,500,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Keindahan dan keamanan siswa di lingkungan sekolah, Penataan lingkungan sekolah di 55 SD/SMP	45 perbaikan lingkungan	5	350,000,000	9	630,000,000	11	770,000,000	10	700,000,000	10	700,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Mebel sekolah mengalami keusakan/kurang sejumlah 480 unit/ruang SD/SMP	184 unit mebel	38	494,000,000	50	650,000,000	70	910,000,000	50	650,000,000	50	650,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	107 ruang kelas SMP rusak berat/sedang, rehab ruang kelas 107 ruang	107 ruang	20 ruang	1,600,000,000	25 ruang	2,000,000,000	30 ruang	2,400,000,000	17 ruang	1,360,000,000	0	
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	sekolah belum memiliki ruang Lab. Bahasa sejumlah 87 sekolah SMP negeri/swasta	27 ruang	4	784,000,000	5	980,000,000	6	1,176,000,000	5	980,000,000	5	980,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	sekolah belum memiliki ruang Lab. IPA sejumlah 56 sekolah SMP negeri/swasta	27 ruang	4	784,000,000	5	980,000,000	6	1,176,000,000	5	980,000,000	5	980,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Jumlah rombel tidak sebanding jumlah ruang kelas, 63 ruang kelas baru SMP	63 ruang	10	1,200,000,000	12	1,440,000,000	20	2,400,000,000	3	3,600,000,000		-

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah belum ada/rusak berat ruang guru/KS sejumlah 47 sekolah, Pembangunan ruang Guru/KS 47 SD	30 ruang guru/ks SMP	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	8	1,600,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah masih kurang/belum ada Peralatan Lab. Bahasa 74 sekolah, pengadaan Alat Lab. Bahasa 74 unit	20 peralat Lab Bahasa	2	300,000,000	4	200,000,000	5	750,000,000	4	600,000,000	4	600,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah masih kurang/belum ada Peralatan Lab. IPA 49 sekolah, pengadaan Alat Lab. IPA 49 unit	24 pelatan Lab. IPA	2	100,000,000	5	250,000,000	7	350,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000
<b>SEKSI KEPENDIDIKAN SMP</b>												
Latihan Ujian Nasional SMP/ Try Out SMP/MTs.	Latihan Ujian Nasional SMP/MTs Kab Tegal 21.500 siswa, 20 paket untuk 4 mapel UN	Master soal 180 SMP/MTs	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs.	Terlaksananya Ujian Nasional Siswa SMP/MTs Kab Tegal melaksanakan UN 21.500	Siswa 21.300 lulus UN 99,6 %	siswa 21.500 lulus UN 99.8%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 99.9%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 100%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 100%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 100%	385,000,000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N,OSN,LCC,Siswa Berprestasi)	Belum berprestasi FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi tingkat . Provinsi. Terlaksananya FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi tingkat kab dan pengiriman tingkat provinsi	1000 peserta	1200 peserta	200,000,000	1250 peserta	200,000,000	1250 peserta	200,000,000	1300 peserta	200,000,000	1300 peserta	200,000,000
Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI SMP Kab. Tegal	Mempertahankan prestasi Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI tingkat provinsi. Terlaksananya Kegiatan MAPSI SMP tingkat kab	250 siswa	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000

Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Tegal	Ditetapkannya Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Tegal. Terlaksananya Kegiatan MAPSI SMP Tk. Prvinsi Jateng di Kab. Tegal.	35 kab/kota	35 kab / kota	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Kurikulum 2015 Tingkat SMP	Terlaksana Pelatihan Kurikulum 2015		100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000
Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nas Tingkat SMP	Hasil Nilai UN SMP kab Tegal peringkat 28/ prov Jateng . Terlaksananya bedah SKL Mapel Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia. IPA dan Matematika untuk menaikkan peringkat kelulusan	Rangking 28/ prov Jateng . Ter	rangking 10 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 9 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 8 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 7 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 6 Besar tk prov.	80,000,000
Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal	Tidak tertanganinya pengembangan kurikulum oleh TPK secara struktural dan terprogram. Tersedianya fasilitasi TPK kab. Tegal	100 SMP N /S	80 SMPN/S	20,000,000	90 SMPN/S	20,000,000	95 SMPN/S	20,000,000	98 SMPN/S	20,000,000	100 SMPN/S	20,000,000
Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pend. Anti Korupsi dan Pend. Lalu Lintas	Belum terimplementasi integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pend. Anti Korupsi dan Pend. Lalu Lintas. Terlaksananya pelatihan Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pend. Anti Korupsi dan Pend. Lalu Lintas	47 SMPN 49 SMP S	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000
Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan	88 sekolah N/S belum mengelola perpustakaan dan laboratorium sesuai standar pelayanan Minimal. Terlaksananya pelatihan pengelola laboratorium dan pustakawan	12 SMPN	50 SMPN/S	30,000,000	60 SMPN/S	30,000,000	70 SMPN/S	30,000,000	80 SMPN/S	30,000,000	88 SMPN/S	30,000,000

Pengadaan Alat Lab. IPA	55 SMP N/S belum terpenuhi Laboratorium IPA sesuai dengan SPM. Terpenuhi alat laboratorium IPA	45 SMPN /S	10 SMP N/S	750,000,000	20 SMP N /S	750,000,000	30 SMP N /S	750,000,000	40 SMP N /S	750,000,000	55 SMP N /S	750,000,000
Fasilitasi Kantin Sehat Implementasi Pendidikan Karakter	Sejumlah 94 SMP N/S belum memiliki kantin sehat. Tersedianya fasilitas Kantin sehat	6 SMPN/S	10 SMP N/S	22,500,000	20 SMP N/S	22,500,000	30 SMP N/S	22,500,000	40 SMP N/S	22,500,000	50 SMP N/S	22,500,000
Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP	Sejumlah 100 Ks belum memiliki Kompetensi manajerial yang baik. Terlaksananya pelatihan Manajemen Kepala sekolah		80 SMP N/S	20,000,000	90 SMP N/S	20,000,000	95 SMP N/S	20,000,000	95 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000
Pengadaan Buku Perpustakaan	Sejumlah 88 SMP N /S belum memiliki perpustakaan yang berstandar. Tersedianya Buku Perpustakaan SMP	12 SMP N/S	10 SMP N/S	70,000,000	20 SMP N/S	70,000,000	30 SMP N/S	70,000,000	40 SMP N/S	70,000,000	50 SMP N/S	70,000,000
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa	Sejumlah 70 SMP N /S belum memiliki buku mulok sesuai SK Gubernur. Tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa	30 SMP N/S	10 SMP N/S	30,000,000	20 SMP N/S	30,000,000	30 SMP N/S	30,000,000	40 SMP N/S	30,000,000	50 SMP N/S	30,000,000
Fasilitasi Kantin Kejujuran	Sejumlah 100 SMP N/S belum memiliki kantin kejujuran. Tersedianya 50 fasilitas kantin kejujuran		10 SMPN/S	50,000,000	20 SMPN/S	50,000,000	30 SMPN/S	50,000,000	40 SMPN/S	50,000,000	50 SMPN/S	50,000,000
Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP	Sebagian besar sekolah belum inovatif dalam pembuatan media pembelajaran. Telaksananya Pelatihan pembelajaran dan pembuatan media		70 SMP N /S	30,000,000	80 SMP N /S	30,000,000	90 SMP N /S	30,000,000	100 SMP N /S	30,000,000	100 SMP N /S	30,000,000

Sosialisasi dan Pelatihan PPDB Online SMP/MTs	Kewajiban 100 SMP N/ S menggunakan PPDB online. Terlaksananya pelatihan PPDB Online		40 % SMP N /S	20,000,000	50 % SMP N /S	20,000,000	60 % SMP N /S	20,000,000	70 % SMP N /S	20,000,000	80 % SMP N /S	20,000,000
Pengembangan Kegiatan 10 mapel MGMP Kab. Tegal	Sejumlah 12 Mapel melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara swadaya. Terwujudnya Kegiatan MGMP 10 mapel		10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal	Sebagian kecil Sekolah/ siswa berpartisipasi Lomba LPIR dan Lomba Pidato. Terlaksananya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal	5 Siswa	100 siswa	20,000,000	110 siswa	20,000,000	120 siswa	20,000,000	130 siswa	20,000,000	150 siswa	20,000,000
Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	Apresiasi dan gelar seni budaya dilaksanakan swadaya MGMP Mapel Seni budaya dan Prakarya. Terlaksananya Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	1	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000
Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal	Budaya sekolah bersih dan program adiwiyata tidak optimal. Tersedianya fasilitas adiwiyata di tk SMP	1 SMP	10 SMP	30,000,000	20 SMP	30,000,000	30 SMP	40,000,000	30 SMP	30,000,000	40 SMP	30,000,000
Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	Lomba jurnalistik tidak diminati sekolah. Terlaksananya Pelatihan dan Jurnalistik Tingkat SMP		200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000
Penerbitan majalah siswa Kabupaten Tegal	Belum ada wadah kreatifitas menulis bagi siswa. Terwujudnya majalah siswa SMP Kab. Tegal		100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000
<b>SEKSI PENDIDIKAN TK/SD</b>												
Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD	Meningkatnya prestasi siswa dibidang Seni Islam	750 Siswa	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000

(MAPSI)												
Pelatihan Kurikulum	Terlaksananya Kurikulum sesuai dengan kurikulum yang baru	70 Satuan Pendidikan	70	30,000,000	70	30,000,000	70	30,000,000	70	30,000,000	70	30,000,000
Festifal Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains )	Terlaksananya KEGIATAN fls2n,osn,Siswa Berprestasi	180 Siswa	180	175,000,000	180	175,000,000	180	175,000,000	180	175,000,000	180	175,000,000
Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK/RA	Terlaksananya lomba Kreatifitas Siswa TK/RA	250 siswa	250	25,000,000	250	25,000,000	250	25,000,000	250	25,000,000	250	25,000,000
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB	Terlaksananya Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB	26825 Siswa	26850	445,000,000	26850	445,000,000	26850	445,000,000	26850	445,000,000	26850	445,000,000
<b>BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>												
<b>Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik</b>												
<b>Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik</b>	Para pendidik formal dapat memenuhi persyaratan kualifikasi akademiknya	Pendidik sudah memenuhi kualifikasi minimal = 9.984 orang guru dan 3499 guru belum S-1	900 org		850 org		750 org		600 org		399 org	
Menyalurkan bantuan biaya S-1 dari APBN	Meringankan beban biaya pendidikan bagi guru	200 orang guru @ 3.500.000,- = Rp.700.000.000,-	200 org	700000000	150 org	525000000	100 org	350000000	65 org	227500000	45 org	157500000
<b>Peningkatan profesional pendidik</b>												
2.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan												

a. Diklat pendidik	Meningkatkan kompetensi profesi pendidik	Memfasilitasi permintaan peserta diklat dari provinsi, lembaga diklat lainnya	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000
b. Diklat calon kepala sekolah	Membekali teori dan pengalaman praktik sebagai kepala sekolah agar menghasilkan calon kepala sekolah yang kompeten	226 calon KS yang belum didiklat dari hasil seleksi tahun 2015	226 org	678.000.000			131 org	458.000.000,-			68 org	272.000.000,-
2.2. Kegiatan sertifikasi guru	Memenuhi guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik	633 orang melalui PLPG 2015	422 org	25.000.000	125 org		25 org					
2.3. Kegiatan induksi guru baru	Memiliki kemampuan berorientasi dengan proses pembelajaran profesional dalam konteks pada satuan pendidikan bagi pendidik baru	313 guru baru										
2.4. Kegiatan kolektif guru (KKG, KKKS, MGMP, MGBK, MKKS)	Terfasilitasinya para pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)	Terbentuknya koordinator PKB. Wadah kegiatan pembinaan profesi para pendidik dan tenaga kependidikan	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000
<b>Pengelolaan data kepegawaian tendik</b>	Pengelolaan data kepegawaian menggunakan SIM tendik	Data kepegawaian tersedia dengan pengolahan secara manual	1 sim tendik	50.000.000								

<b>Pengelolaan data aneka tunjangan dan kesejahteraan (tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan bantuan kesejahteraan)</b>	Peningkatan kesejahteraan pendidik melalui aneka tunjangan	Tunjangan profesi = 5.266 org. Tunjangan fungsional 750 org	5.688 org / 750 org		5.813 org / 750 org		6.000 org / 750 org		6.150 org / 750 org		6.300 org / 7500 org	
<b>Penilaian Kinerja</b>												
3.1. Penilaian Kinerja Guru (PK G)	Menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Pembinaan karir dan jabatan guru	6.981 guru PNS	7.000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000
3.2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	Penilaian kinerja KS. Tersedianya data penilaian kinerja kepala sekolah masa tugas 1 dan/ 2	686 org dan 100 org kepala sekolah Rp.75.000.000,-	579 org dan 207 org	123.500.00	515 org dan 271 org		730 org dan 56 org		620 org dan 166 org		607 org dan 179 org	
3.3 Penilaian Kinerja Penilik	Menentukan derajat mutu kinerja penilik. Pembinaan karir dan jabatan penilik	53 orang	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000
3.4. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	Menentukan derajat mutu kinerja pengawas sekolah. Pembinaan karir dan jabatan pengawas sekolah	77 orang	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00
<b>Pengelolaan kenaikan jabatan dan kepangkatan tenaga pendidik</b>	Memjamin kelangsungan pembinaan karir, jabatan dan kepangkatan tenaga pendidik	(6.981 pendidik PNS). Naik pangkat dan jabatan 1.500 org Rp.75.000.000,-	1.750 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000
<b>Pembinaan personal dan penyelesaian kasus kepegawaian tenaga pendidik</b>	Penegakan disiplin pegawai dan diselesaikan atas kasus dan pelanggaran disiplin	7 kasus pembinaan keluarga dan 2 kasus indisipliner	50 org		50 org		45 org		45 org		40 org	

<b>Seleksi calon Kepala Sekolah, Pengawas sekolah, Penilik</b>	Tercukupinya formasi kepala sekolah, pengawas dan penilik	50 orang Rp 50.000.000,-			300 org	300.000.000			150 org	150.000.000		
<b>Serah terima jabatan tenaga kependidikan</b>	Tercapainya pelayanan prima Bidang Tendik	Rp.10.000.000,-	1 kali	15.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000
<b>Penilaian dan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi</b>												
a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan prestasi kinerja, motivasi kerja dan pengakuan serta penghargaan pada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal	100 org Rp.100.000.000,-	100 org	110.000.000	100 org	110.000.000	100 org	120.000.000	100 org	120.000.000	100 org	125.000.000
b. Jambore PNFI	Peningkatan kualitas PTK PAUD Kab.Tegal	80 orang pendidik Rp.75.000.000,-	100 org	100.000.000	110 org	150.000.000	120 org	150.000.000	150 org	150.000.000	200 org	150.000.000
c. OSN Guru	Peningkatan mutu guru, pembinaan, motivasi dan pengakuan potensi serta penghargaan bagi para guru		42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000
<b>Pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Tendik</b>												
<b>Bantuan peningkatan kualifikasi ke S-1 bagi pendidik PAUD dan Pendidikan Formal</b>												
a. Pendidik Paud	Peningkatan kualifikasi pendidikan pendidik PAUD (TK/KB/TPA/SPS)	44 orang pendidik Rp.154.000.000,-	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000
b. Pendidik Pendidikan Formal	Peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi pendidik pendidikan formal	150 orang pendidik Rp.525.000.000,-	150 org	525.000.000	150 org	525.000.000	100 org	350.000.000	100 org	350.000.000	75 org	262.500.000
<b>Bantuan kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti</b>												

a. Pendidik Paud	Peningkatan kesra PAUD (TK) dan peningkatan kualitas pendidik PAUD	258 orang guru , biaya Rp 586.950.000,-	258 org	586.950.000	260 org	591.500.000	280 org	637.000.000	290 org	659.750.000	300 org	682.500.000
b. Pendidik Pendidikan Formal	Peningkatan kesejahteraan guru wiyata bhakti Pendidikan formal	577 orang guru, biaya Rp.1.312.675.000,-	600 org	1.365.000.000	600 org	1.365.000.000	600 org	1.365.000.000	550 org	1.251.250000	550 org	1.251.250000
<b>Bantuan perjalanan tutor PAUD Non Formal</b>	Peningkatan kesra pendidik PAUD (TK) dan peningkatan profesional pendidik	110 orang PTK Paud Anggaran Rp 200.000.000,-	150 org	270.000.000	160 Org	188.000.000	170 org	306.000.000	180 org	324.000.000	200 org	360.000.000
<b>Bantuan Pengembangan Profesi</b>	Pengembangan kreatifitas para pendidik dalam mengembangkan profesinya											
<b>BIDANG PEMBINAAN PAUDNI</b>												
Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	Terpenuhinya sarpras PAUD sejumlah 1.000 lembaga sesuai standar pendidikan anak usia dini pada tahun 2019	24 Paket										
- Mebelair ( Meja, Kursi dan Papan Tulis )			3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000
- RKB			3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000
Bantuan Pengadaan APE	Terpenuhinya APE PAUD SEJUMLAH 850 lembaga pada tahun 2019	50 Lembaga PAUD	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000
Pembangunan Unit Gedung Baru ( UGB ) PAUD Terpadu	Terpenuhinya pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu di Kab. Tegal	4 Lembaga	3	900,000,000	3	900,000,000	3	900,000,000	3	900,000,000	3	900,000,000
Penyempurnaan Unit Gedung Baru ( UGB )	Terpenuhinya unit gedung baru bagi PAUD Terpadu di 18 kecamatan pada tahun 2019	4 kecamatan	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000

Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Meningkatnya prestasi dan keterampilan AUD di semua lembaga (18 kecamatan) dari semua cabang mata lomba minimal juara tingkat provinsi pada tahun 2019	9 mata lomba juara tingkat kabupaten dan 2 mata lomba juara tingkat provinsi	1	15,000,000	1	25,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Meningkatnya jumlah gugus berprestasi dan lembaga KB/TK berprestasi sejumlah 18 gugus dan PAUD Terpadu berprestasi 56 lembaga pada tahun 2019	Gugus di 2 kecamatan dan KB/TK di 4 kecamatan	1	18,000,000	1	20,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000
Pelatihan Kopentensi Tenaga Pendidik PAUD	Meningkatnya kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD sejumlah 8.506 PTK PAUD pada tahun 2019	3.226 PTK	60 PTK	50,000,000	80 PTK	75,000,000	120 PTK	100,000,000	140 PTK	120,000,000	160 PTK	150,000,000
Rintisan PAUD	Terselenggaranya lembaga PAUD di 286 desa di Kabupaten Tegal pada tahun 2019	8 desa belum ada lembaga PAUD	2	90,000,000	2	90,000,000	2	90,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Terpenuhinya jumlah lembaga PAUD penerima BOP sejumlah 1.000 lembaga pada tahun 2019	563 lembaga	153	1,101,600,000	169	1,216,800,000	189	1,360,800,000	207	1,490,400,000	226	1,627,200,000
Penguatan Kelembagaan PAUD	Terbentuknya lembaga PAUD Unggulan Terpadu, Holistik, Integratif di 18 kecamatan, minimal masing-masing kecamatan 3 lembaga PAUD Unggulan Terpadu pada tahun 2019	4 kecamatan sejumlah 5 lembaga PAUD Unggulan Terpadu	2	50,000,000	3	75,000,000	5	125,000,000	7	175,000,000	11	275,000,000
Motifasi dan Stimulasi Penyelenggaraan PAUD	Terbentuknya lembaga PAUD berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi sejumlah 25 lembaga penyelenggara PAUD berprestasi pada tahun 2019	4 lembaga PAUD Berprestasi, terdiri dari 2 TK dan 2 KB	1	10,000,000	2	20,000,000	3	30,000,000	4	40,000,000	5	50,000,000

Bantuan Organisasi Mitra PNF	Meningkatnya kegiatan organisasi mitra PAUD/PNF yang terdiri pada tahun 2019	IGTKI, HIMPAUDI, FORUM PAUD, PKK, GOPTKI, MUSLIMAT NU, AISYIYAH	2	16,000,000	3	24,000,000	4	32,000,000	6	48,000,000	8	64,000,000
Bantuan Taman Bermain Anak Usia Dini	Terbentuknya lembaga taman bermain anak usia dini sebanyak 20 lembaga pada tahun 2019	1 lembaga taman bermain AUD	2	50,000,000	2	50,000,000	4	100,000,000	5	125,000,000	5	125,000,000
Bantuan Lomba Gugus PAUD	Meningkatnya peran dan fungsi gugus dan PKG PAUD di 18 kecamatan pada tahun 2019	Gugus dan PKG yang berjalan optimal sesuai peran dan fungsinya di 6 kecamatan (30%)	11	110,000,000	12	120,000,000	13	130,000,000	14	140,000,000	15	150,000,000
Bantuan Parenting	Terbentuknya lembaga PAUD Penyelenggara Parenting di 36 lembaga pada tahun 2019	4 lembaga PAUD	1	15,000,000	2	30,000,000	4	60,000,000	6	90,000,000	8	120,000,000
Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	Terpenuhnya Penyelenggaraan Evaluasi Semesteran bagi seluruh peserta didik Paket A, B dan C sampai tahun 2019	Paket A : 6 Lembaga, Paket B : 26 Lembaga, Paket C : 32 Lembaga.	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B	Terpenuhnya Penyelenggaraan UN bagi peserta didik Paket A= 59, B= 519 pada tahun 2019	Paket A : 4 Lembaga, Paket B : 16 Lembaga,	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C	Terpenuhnya Penyelenggaraan UN bagi peserta didik Paket C= 1.377 sampai dengan tahun 2019	Paket C : 28 Lembaga	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Meningkatnya kesejahteraan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan PKBM dan Ponpes sampai dengan tahun 2019	Tutor Paket B= 32 orang dan Paket C= 32 orang	1	300,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A	Terlayannya warga masyarakat miskin atau faktor lain yang belum terlayani pendidikan dasar (SD/MI) sejumlah 780 warga belajar pada tahun 2019	133 warga belajar yang terdiri dari kelas IV, V dan VI	2	20,000,000	3	30,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Paket B	Terlayannya warga masyarakat miskin atau faktor lain yang belum terlayani pendidikan dasar (SMP/MTs) sejumlah 15.650 warga belajar pada tahun 2019	1.433 warga belajar yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX	15	225,000,000	16	240,000,000	17	255,000,000	18	270,000,000	20	300,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C	Terlayannya warga masyarakat miskin atau faktor lain yang belum terlayani pendidikan dasar (SMA/MA) sejumlah 7.605 warga belajar pada tahun 2019	3.052 warga belajar yang terdiri dari kelas X, XI, dan XII	2	73,000,000	4	146,000,000	5	182,500,000	6	219,000,000	7	255,500,000
Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI )	Keikutsertaan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi Jawa Tengah	24 Lembaga PKBM	1	10,000,000	1	15,000,000	1	17,000,000	1	19,000,000	1	20,000,000
Kursus Kewirausahaan Desa ( KWD )	Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda di pedesaan sejumlah 3.400 orang pada tahun 2019	824 orang yang tersebar di 7 desa vokasi dan 4 LKP (20%)	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
Penguatan Manajemen Desa Vokasi	Menunjang kegiatan program kursus kewirausahaan desa dan HAI	18 Kecamatan	6	90,000,000	10	150,000,000	15	225,000,000	17	255,000,000	20	300,000,000
Program Penuntasan Buta Aksara Kab. Tegal	Jumlah Buta Aksara Kab. Tegal Usia 15-59 tahun masih 50.339 orang.	3.015 orang	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000

Fasilitasi Keaksaraan Dasar	Terlayannya warga masyarakat buta huruf keaksaraan dasar sejumlah 5.737 warga belajar pada tahun 2019	2.750 warga belajar keaksaraan dasar se kabupaten Tegal	275	990,000,000	425	1,530,000,000	550	1,980,000,000	650	2,340,000,000	700	2,520,000,000
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan	Terlayannya warga masyarakat buta huruf keaksaraan lanjutan sejumlah 9.737 warga belajar pada tahun 2019	400 warga belajar keaksaraan lanjutan se Kabupaten Tegal	60	276,000,000	170	782,000,000	370	1,702,000,000	100	460,000,000	100	460,000,000
Pengembangan PKBM	Meningkatnya jumlah PKBM yang mandiri sejumlah 24 lembaga PKBM pada tahun 2019	3 PKBM terakreditasi lembaga dan program yang sudah mandiri	1	25,000,000	3	75,000,000	5	125,000,000	7	175,000,000	9	225,000,000
Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)	Meningkatnya jumlah lembaga LKP yang kuat sejumlah 50 LKP pada tahun 2019	10 Lembaga LKP yang kuat	3	75,000,000	4	100,000,000	5	125,000,000	6	150,000,000	7	175,000,000
Kelompok Belajar Usaha ( KBU )	Berkembangnya jumlah warga masyarakat untuk belajar usaha dalam kelompok dalam memanfaatkan potensi lokal sejumlah 60 kelompok pada tahun 2019	15 KBU yang berkembang dan berjalan di 12 lembaga PKBM			8	80,000,000	9	90,000,000	10	100,000,000	11	110,000,000
Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Meningkatkan daya baca masyarakat	18 Kecamatan	3	30,000,000	8	80,000,000	9	90,000,000	10	100,000,000	11	110,000,000
Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan keadilan Gender di semua sektor kegiatan	18 Kecamatan	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000
Peningkatan Sarana Prasarana Nonformal	Meningkatkan sarana dan prasarana PKBM	18 Kecamatan	4	260,000,000	5	325,000,000	6	390,000,000	7	455,000,000	8	520,000,000
Lomba Inovasi Pembelajaran bagi Tutor/Pamong Belajar Program Paket B	Keikutsertaan lomba tingkat Nasional	2 PKBM/SKB	2	100,000,000	3	150,000,000	4	200,000,000	5	250,000,000	6	300,000,000

Cerdas Cermat bagi peserta didik Program Paket B	Keikutsertaan lomba tingkat Nasional	2 PKBM/SKB	5	250,000,000	6	300,000,000	7	350,000,000	8	400,000,000	9	450,000,000
Lomba Keterampilan (unjuk kerja keterampilan) bagi peserta didik Program Paket B	Keikutsertaan lomba tingkat Nasional	2 PKBM/SKB	7	350,000,000	8	400,000,000	9	450,000,000	10	500,000,000	11	550,000,000
BIDANG BINA PROGRAM												
Progra Pelayanan Manajemen Pendidikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta pelaporan	-	-	-	-	-	6 Dokumen Perencanaan dan 12 Dokumen Pelaporan	50.000.000	6 Dokumen Perencanaan dan 12 Dokumen Pelaporan	60.000.000	6 Dokumen Perencanaan dan 12 Dokumen Pelaporan	70.000.000
	Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	6 Pendataan	100.000.000	6 Pendataan	100.000.000	6 Pendataan	100.000.000
BIDANG KEBUDAYAAN												
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				2.308.800		2.354.976		2.508.049		2.688.628		2.914.472
	Jumlah pertunjukan seni	3	4		3		3		3		3	3
	Jumlah pameran seni	1	0		1		1		1		1	1
	Jumlah misi/muhibah kesenian	0	2		1		1		1		1	1
	Jumlah sarana pertunjukan seni	1	2		10		15		19		19	19
	Jumlah pelaku seni yang dibina	3.110	90		3.110		3.110		3.110		3.110	3.110
	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	311	70		343		360		378		397	397
	Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	0	2		4		4		4		4	4
	Jumlah maestro seni	1	1		3		3		3		3	3
<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				235.000		239.700		255.280		273.660		296.647
	Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3	7		3		3		3		3	3
	Jumlah naskah kuno yang dikaji	1	1		1		1		1		1	1
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				687.000		700.740		746.288		800.020		867.221
	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2	-		2		2		2		2	2



